



BerAKHLAK **#** bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

BIRO

ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

HASIL REVIEW

SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT

2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Gambaran Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	28
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	30
3.3 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	32
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025	82
BAB IV PENUTUP	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Permasalahan dan Kendala.....	93
4.3 Langkah-Langkah yang Dilakukan Masa Mendatang	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan	11
Tabel 2.1. 1	Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Dengan Misi, Tujuan Dan Sasaran Kepala Daerah Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	16
Tabel 2.1. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	19
Tabel 2.2. 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 2.2. 2	Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
Tabel 2.2. 3	Perbandingan Anggaran Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan Tahun 2025	24
Tabel 3.1. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.2. 1	Pengukuran Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025	31
Tabel 3.3.1. 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	35
Tabel 3.3.1. 2	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja	40
Tabel 3.3.1. 3	Perbandingan Capaian Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Tahun 2025 dengan Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	41
Tabel 3.3.1. 4	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja	42
Tabel 3.3.1. 5	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan T.A 2025	47
Tabel 3.3.1. 6	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Tahun 2025	49
Tabel 3.3.2. 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	51
Tabel 3.3.2. 2	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja	53
Tabel 3.3.2. 3	Nilai SAKIP Tahun 2025 lingkup Setda Provinsi Sumatera Barat	54
Tabel 3.3.2. 4	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja	55
Tabel 3.3.2. 5	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	65
Tabel 3.3.3. 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran III	67
Tabel 3.3.3. 2	Tabel Rekapitulasi Kuisisioner	69
Tabel 3.3.3. 3	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Organisasi	74
Tabel 3.3.3. 4	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja	75

Tabel 3.3.3. 5	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran III	76
Tabel 3.3.3. 6	Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja	79
Tabel 3.3.3. 7	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	83
Tabel 3.4. 1	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	86
Tabel 3.4. 2	Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan	11
Grafik 2 Sasaran Strategis I Tahun 2021 s.d 2025.....	43
Grafik 3 Sasaran Strategis II Tahun 2021 s.d 2025.....	62
Grafik 4 Sasaran Strategis III Tahun 2022 s.d 2025.....	80
Grafik 5 Realisasi Fisik dan Keuangan	89

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025. Kinerja pemerintahan baik pada level daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pada skala nasional saat ini dihadapkan suatu kondisi yang harus dicapai, yaitu menerapkan paradigma baru pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, tanggap, orientasi terhadap konsensus, partisipatif, efektifitas, efisien dan visi strategis yang kesemuanya ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro. Laporan Kinerja juga bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja merupakan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sepenuhnya kami menyadari, bahwa kualitas laporan ini belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen seluruh pegawai Biro dalam mengimplementasikan prinsip akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Faktor eksternal yang bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Biro. Selain itu target indikator kinerja yang ditentukan oleh Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biro Administrasi Pembangunan selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Hasil dari penulisan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh bagian di lingkungan Biro tentang aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing serta sejauhmana capaian kinerja dapat diwujudkan pada tahun 2025 dan menjadi acuan dimasa mendatang untuk mewujudkan peningkatan kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Padang, 03 Maret 2026
**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN**



RIA WIJAYANTY, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770413 200003 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran organisasi.

Memenuhi maksud tersebut diatas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penerapan tahun kedua dari Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini disusun untuk mewujudkan kewajiban Biro guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi Biro dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan sasaran strategis yang menjadi target pelaksanaan kegiatan
2. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 98.44%
3. Pencapaian sasaran strategis 1 (satu) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja **yaitu *Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** dengan realisasi **98.73%**. dan capaian indikator kinerja sebesar **101.78%**.

4. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap **Persentase Perangkat Daerah Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan** adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi Simbangda bagi seluruh OPD Provinsi agar dapat terlaksananya tertib administrasi pembangunan yang mana seluruh OPD melakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan.
5. Pencapaian sasaran strategis 2 (dua) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja** dengan realisasi **73.76 (BB)** dan capaian kinerja sebesar **102.44%**.
6. Pencapaian sasaran strategis 3 (tiga) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu **Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi** dengan realisasi **82 (B)** dan capaian kinerja sebesar **91.11%**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan adalah salah satu Biro dari 9 (sembilan) Biro yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pembentukan awal dari Biro-Biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Administrasi Pembangunan merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang pengendalian administrasi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan dasar terbentuknya Nomenklatur Biro Administrasi Pembangunan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Nomenklatur Biro Administrasi Pembangunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan di perbaharui dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan *“membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan”*.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, biro mempunyai fungsi :

- a) Mendorong Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

- b) Menjadikan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
- c) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja serta Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
- d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Pembaunangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut

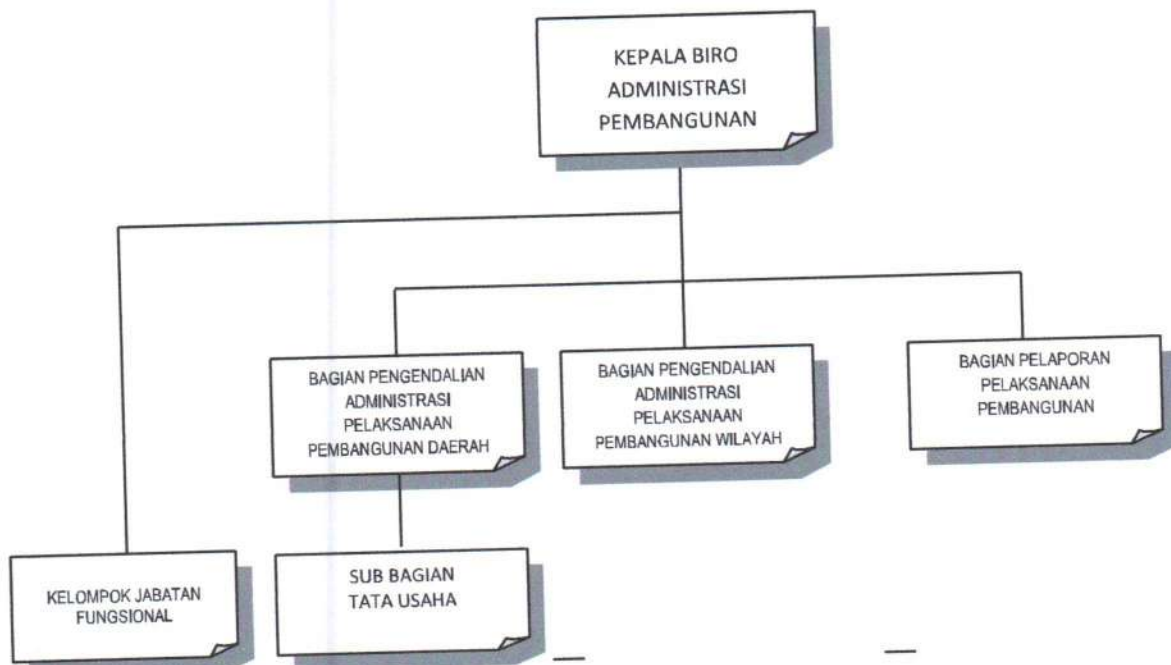
- 1) penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 2) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 3) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pembangunan.

c. Struktur Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala dan Bagian 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Pejabat Fungsional dan Pelaksana seperti bagan struktur dibawah ini :

Gambar 1.1

**Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan
STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023)**



- 1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pembangunan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pembangunan.

2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pembangunan.

3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak

- yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pembangunan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan kinerja yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2025, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki Aparatur Sipil Negara sebanyak 23 orang dan 5 Non Aparatur Sipil Negara dengan total seluruh pegawai 28 orang. Adapun rincian sebagai berikut 5 orang struktural, 4 orang fungsional, 14 orang pelaksana. Selain itu Biro Administrasi Pembangunan dibantu 4 orang tenaga kontrak dan 1 orang tenaga IT kontrak. Dari 4 orang tenaga kontrak tersebut 2 orang tenaga kontrak dari Biro Umum yang diperbantukan pada Biro Administrasi Pembangunan. Pada tabel 1.1. dan grafik 1.1. berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan.

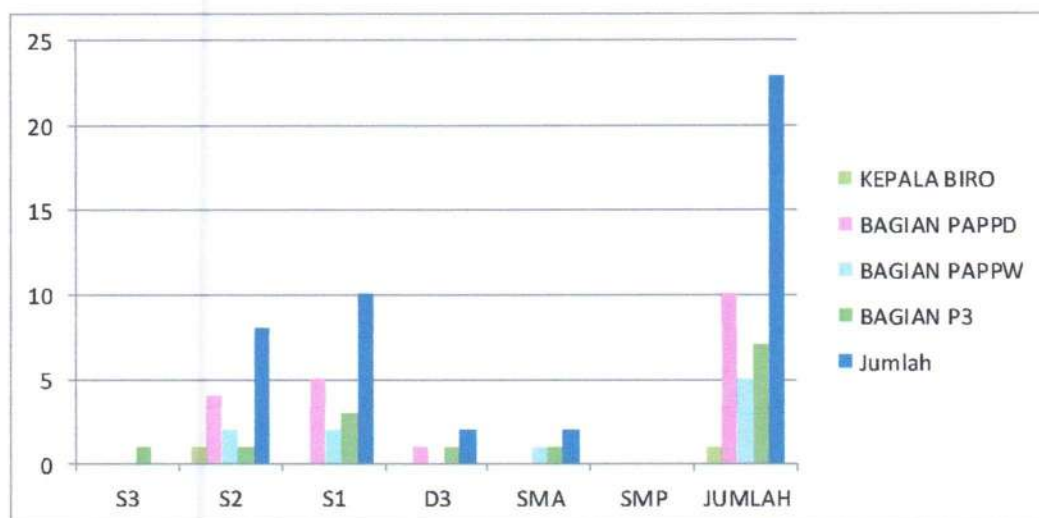
Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan

No.	URAIAN	PENDIDIKAN						JML
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	Kepala Biro	0	1	0	0	0	0	1
2.	Bagian PAPPD	0	4	5	1	0	0	10
3.	Bagian PAPPW	0	2	2	0	1	0	5
4.	Bagian P3	1	1	3	1	1	0	7
	JUMLAH	1	8	10	2	2	0	23

Sumber : Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat dilihat, pada tahun 2025 pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat 4,3 % berpendidikan S3 atau sebanyak 1 orang, 34,8% berpendidikan S2 atau sebanyak 8 orang, 43,4% berpendidikan S1 atau sebanyak 10 orang, 8,7% berpendidikan D3 atau sebanyak 2 orang dan 8,7% berpendidikan SMU atau sebanyak 2 orang. Pegawai tersebut tersebar di 3 bagian yang ada dilingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan



1.1 Aspek Strategis Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBD
- b. Koordinasi dengan SKPD terkait dan Kementerian/Lembaga dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBN
- c. Koordinasi dengan SKPD terkait Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten/Kota
- d. Rapat evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota
- e. Pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota
- f. Koordinasi dengan SKPD terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan kebijakan pembangunan
- g. Penerapan aplikasi monitoring dan evaluasi untuk efektifitas dan efisiensi pengendalian pembangunan Sumatera Barat.

Dalam melaksanakan peran aspek strategis tersebut juga di dukung dengan arah kebijakan yang tertuang didalam Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBD sesuai dengan target
- b. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBN sesuai dengan target
- c. Meningkatkan pembinaan ke Kabupaten/Kota
- d. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBD yang anggaran APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota
- e. Meningkatkan pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota yang efisien

- f. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan peraturan terkait pengendalian pembangunan
- g. Meningkatkan pengendalian administrasi pembangunan secara efektif dan efisien

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung pencapaian Misi 7 (tujuh) **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”**. Untuk mendukung kinerja Biro Administrasi Pembangunan dalam pencapaian Misi 7 (tujuh) tersebut dilakukan melalui 1 Program yaitu **“ Program Kebijakan Administrasi Pembangunan “**

Pada saat ini Biro Administrasi Pembangunan terdapat 3 (tiga) Sasaran Startegis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Adapun yang menjadi permasalahan utama dan menjadi indikator sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 yaitu ***Persentasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.*** Biro Administrasi Pembangunan bertujuan *“ bagaimana seluruh Perangkat Daerah (PD Provinsi Sumatera Barat) dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan tertib administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dari dana APBD dan APBN “*.

1.3 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Biro Administrasi Pembangunan masih dihadapi pada berbagai permasalahan antara lain :

- a. Membutuhkan perbaharuan terhadap peraturan terkait pengendalian pembangunan di Sumatera Barat seperti peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, peraturan tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran, peraturan tentang proyek strategis/tahun jamak. Sehingga ada kepastian hukum dan pegangan bagi pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

- b. Monev yang dilaksanakan hanya menyentuh sebagian kecil dari paket pekerjaan yang ada. Sehingga untuk mengambil kesimpulan dengan sampel yang sedikit itu tentunya kurang valid. Diharapkan kedepannya perlu peningkatan jumlah sampel monev yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi faktor kesalahan dalam mengambil kesimpulan masalah-masalah pembangunan.
- c. Kurangnya sarana mobilitas sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. Idealnya monev yang dilaksanakan selain yang terencana dengan melibatkan SKPD terkait sewaktu-waktu juga perlu dilaksanakan Sidak. Sehingga dapat dilihat kondisi asli dilapangan seperti apa. Hal ini tentunya harus didukung oleh sarana mobilitas yang ideal dalam pelaksanaannya.
- d. Perlu adanya sinkronisasi dari beberapa OPD dalam pengendalian pelaksanaan sebuah kegiatan baik dalam sisi pelaporan pelaksanaan kegiatan, terutama sinkronisasi data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana APBN.
- e. Perlu adanya perencanaan yang matang dari OPD dalam melaksanakan kegiatan, terutama OPD yang memiliki sumber dana dari APBD dan APBN agar ada time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi padatnya pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggaran.
- f. Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output.
- g. Pada umumnya SKPD belum mengentrykan permasalahan dan rencana tindak lanjut di dalam Simbangda yang sudah disediakan fiturnya.
- h. Data yang dilaporkan pada Aplikasi Simbangda masih sering kurang update dan valid.
- i. Belum optimalnya penyelesaian proses lelang karena adanya review HPS untuk pekerjaan Kontruksi.
- j. Masih adanya keterlambatan DAK yang belum selesai akibat kelalaian dari SKPD sehingga mengakibatkan kerugian pada daerah.
- k. Masih adanya kegiatan yang belum terlaksana dan proses tender yang

belum keluar izinnnya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.

- I. Terkait Adanya Sub Kegiatan baru yang tidak dapat diinput karena OPD belum mengetahui tata cara entry kegiatan tambahan.
- m. Sehubungan adanya perbedaan realisasi fisik dan realisasi keuangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan total realisasi antar fisik dan keuangan, dan sudah dilakukan rumusan dengan pemberian bobot terhadap realisasi fisik maupun realisais keuangan, sehingga terdapat keseimbangan terhadap realisasi fisik maupun keuangan.
- n. Terkait adanya OPD yang merubah paket kegiatan menjadi rutin, sehingga perlu dilakukan penguncian terhadap kegiatan tertentu termasuk kegiatan pada program penunjang pemerintah pada anggaran rutin.
- o. Terkait adanya penyatuan paket kegiatan yang seharusnya tidak disatukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hal ini sesuai amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan cascading kinerja. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah berdasarkan kepada **Misi 7** yaitu **"Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas"** "

Tujuan RPJMD 2021-2026 :

" Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani "

Sasaran RPJMD 2021-2026

" Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel "

Berdasarkan Visi dan Misi diatas dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021 – 2026 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.1.1 KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026 dengan MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEPALA DAERAH dalam RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

MISI KE - 7 RPJMD 2021 -2026 :
 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS
 TUJUAN RPJMD 2021-2026 :
 TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DENGAN APARATUE YANG MELAYANI
 SASARAN RPJMD 2021 -2026
 TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Tahun Dasar 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke						
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan pembangunan	Capaian realisasi pembangunan Sumatera Barat											

			Mewujudkan pengendalian pembangunan yang optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib Administrasi Pembangunan	<p>Realisasi Tertib Administrasi Perangkat Daerah = $\frac{\text{Jumlah Evidence Ditetapkan}}{\text{Jumlah Evidence yang Diupload}} \times 100\%$</p> <p>Realisasi Tertib Administrasi Kab/Kota = $\frac{\text{Jumlah KabKota Penyampai Laporan Fisik dan Keuangan}}{\text{Jumlah Seluruh Kab/Kota}} \times 100\%$</p> <p>Total Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan = $\frac{\text{Realisasi Tertib Administrasi Perangkat Daerah} + \text{Realisasi Tertib Administrasi Kab/Kota}}{2} \times 100\%$</p>	NA	90	91	92	93	94	95	
2	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja						B (60.08)	B (61)	B (65)	BB (72)	A (80)	A (95)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun ke - n								
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi				B (77)	B (80)	B (83)	SB (89)	SB (92)	SB (96)
			Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi		Sangat baik : ≥ 91 Baik : 81-90 Sedang : 71-80 Buruk : ≤ 70								

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan Biro Administrasi Pembangunan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, target kinerja hasil (outcome). Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan	Mewujudkan pengendalian pembangunan yang optimal	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM organisasi
		Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Meningkatkan pelayanan umum organisasi	Peningkatan Kualitas Standar Operasional Prosedur dipedomani
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi	Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani

		Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD	Peningkatan pengelolaan BMD
		Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi	Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan

Sumber : Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Di samping itu, perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari Pembangunan instansi yang lebih tinggi kepada Pembangunan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen terhadap amanah yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan penapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai unsur evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah di susun dan ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Januari 2024. Pada Biro-biro penandatanganan Perjanjian kinerja dilakukan antara Kepala Biro dan Sekretaris Daerah selanjutnya untuk Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bersama Gubernur Sumatera Barat. Perjanjian kinerja selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	97 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	SB (90)

Dari tabel 2.2.1 terhadap Perjanjian Kinerja 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran ke 1 (satu) Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal mempunyai target 97% pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro, sedangkan pada Rencana Strategis 2021-2026 Biro Administrasi Pembangunan memiliki target 94%. Penyebab naiknya target Sasaran 1

(satu) karena sejak tahun 2022, 2023 dan 2024 realisasi target yang diperoleh selalu melebihi target yang ditetapkan. Setelah dikoordinasikan dengan Tim Sakip dari Biro Organisasi, maka untuk tahun 2025 terget dinaikkan menjadi 97%.

Sasaran ke 2 (dua) untuk tahun 2025 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” mempunyai target 72 (BB). Pada Renstra Biro Administrasi Pembangunan tahun 2021-2026 target Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan nilai 80 (A). Tidak dilakukan penetapan target sebesar angka pada Renstra 2021-2026 karena pada hasil evaluasi Sakip tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan hanya dapat terealisasi sebesar 70,71 (BB) sedangkan hasil evaluasi Sakip 2024 belum keluar nilainya pada saat penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sehingga hasil koordinasi dengan Tim Biro Organisasi sebaiknya untuk target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi ditetapkan pada angka 72 (BB) tidak jauh dari realisasi tahun 2023, karena biasanya hasil perolehan nilai Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi tidak akan pernah terlalu tinggi peningkatannya disebabkan sangat banyak indikator yang harus dilengkapi pada evaluasi SAKIP OPD.

Sasaran ke 3 (tiga) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi memiliki target 90 (SB) pada Perjanjian Kinerja 2025 sedangkan pada Rencana Strategis 2021-2026 Biro Administrasi Pembangunan memiliki target 92 (SB), akan tetapi realisasi di tahun 2025 pada angka 82 (B). Penetapan target 90 (SB) disebabkan tahun 2024 terealisasi sebesar 89.53 (SB) sehingga dengan Tim Organisasi dilakukan penetapan target sebesar 90 (SB) untuk tahun 2025.

Terdapat sedikit perbedaan sasaran strategis pada Rencana Strategis dengan Perjanjian Kinerja disebabkan karena pengertian pengendalian pembangunan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi biro. Setelah dilakukan koordinasi dengan Biro Organisasi pada saat penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Biro kalimat Mewujudkan Pengendalian

Pembangunan Yang Optimal yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro, sehingga disarankan untuk menambah kata Administrasi. Sehingga sasaran strategis menjadi “Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal “ .

Adapun dalam melaksanakan perjanjian kinerja tersebut Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2025 juga didukung oleh anggaran, anggaran dibawah ini merupakan anggaran perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. 2 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	995.493.737
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.523.200
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.969.920
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.400.000
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.320.000
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	754.576.861
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.758.756
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.945.000
II	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	184.520.000
II.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	104.770.000
II.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	79.750.000
J U M L A H		1.180.013.737

Table dibawah ini merupakan perbandingan anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan tahun 2025 :

Tabel 2.2. 3 Perbandingan Anggaran Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan Tahun 2025

No.	PROGRAM	ANGGARAN		SELISIH	KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	928.044.237	995.493.737	67.449.500	APBD
2	Kebijakan Administrasi Pembangunan	151.969.500	184.520.000	32.550.500	APBD
TOTAL		1.080.013.737	1.180.013.737	100.000.000	

Terjadinya penambahan anggaran untuk tahun 2025 dikarenakan Biro Administrasi Pembangunan kekurangan anggaran dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bermasalah/kritis pada OPD Provinsi.

Perhitungan indikator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
Realisasi indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di hitung berdasarkan hasil validasi terhadap evidence yang disampaikan pada penyampaian laporan keuangan dan fisik pada aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE). Validasi yang di lihat adalah kebenaran data dan dokumen yang disampaikan pada asplikasi Simbangda. Selanjutnya data tersebut akan dihitung oleh aplikasi Simbangda dengan mengeluarkan Tabel Statistika Evidence Perangkat Daerah, yang mana angka dari statistika ini menjadi perhitungan pengendalian tertib administrasi pembangunan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Tertib Administrasi Perangkat Daerah} = \frac{\text{Jumlah Evidence Disetujui}}{\text{Jumlah Evidence yang Diupload}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Tertib Administrasi Kab/Kota} = \frac{\text{Jumlah KabKota Penyampaian Laporan Fisik dan Keuangan}}{\text{Jumlah Seluruh Kab/Kota}} \times 100\%$$

Total Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan =

$$\frac{(\text{Realisasi Tertib Administrasi Perangkat Daerah} + \text{Realisasi Tertib Administrasi KabKota})}{2}$$

2. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD diambilkan dari hasil evaluasi Inspektorat terhadap nilai SAKIP Bappeda Tahun n-1 yang dikeluarkan pada bulan Maret Tahun ke-n.

3. Indikator Kinerja Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Realisasi indikator kinerja Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi di hitung berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Aplikasi Sepakat yang di jalankan oleh Biro Organisasi (<https://sepakat.sumbarprov.go.id/>).

2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan Sumatera Barat. Dalam hal ini Biro Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan kualitas dan capaian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Dan Kebijakan Nasional Pengembangan E-Government, dengan unsur pokok Keterbukaan (transparency), Peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency). Tanggung jawab yang jelas (responsibility), Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dengan membangun Sistem informasi untuk mendukung capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Sistem Pembangunan Daerah (Simbangda) Based Evidence

Sistem Pembangunan Daerah (Simbangda) Based Evidence adalah sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk mengukur capaian/realisasi kinerja pembangunan daerah (fisik/keuangan), pendekatan bukti capaian kinerja secara nyata (*evidence*).

2. Integrasi Simbagda dengan Sipedal

Integrasi Sistem Pembangunan Daerah (Simbangda) pada Biro Administrasi Pembangunan dengan Sistem Informasi Pengendalian PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dimana tahun 2025 setiap proses pengadaan sudah terkoneksi dengan Simbangda, sehingga dapat diketahui pekerjaan yang berdasarkan kontrak. Seluruh tahapan proses pengadaan barang dan jasa dapat tercatat secara elektronik di Sipedal dan akan terkoneksi pada aplikasi Simbangda dengan tujuan mengetahui

paket pekerjaan yang telah dilaksanakan atau yang terkendala dalam rangka pengendalian pembangunan.

3. Web Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai wadah informasi berupa website yang dapat diakses melalui <http://biroadmpembangunan.sumbarprov.go.id>, Website ini memberikan informasi informasi berupa dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Layanan Informasi Media Sosial Selain memberikan informasi melalui website, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki layanan informasi melalui kanal Youtube, Facebook dan Instagram.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

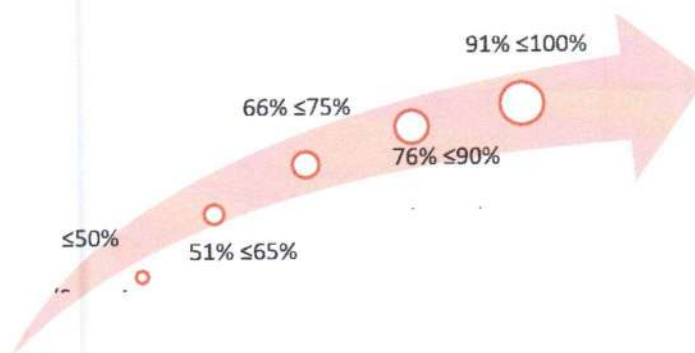
- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Atau dapat juga dengan menggunakan skala peringkat kinerja sebagai bentuk untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan berdasarkan tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 55\%$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan **> 76 %**.

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50\% \right)$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensinya adalah 100%.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

I. Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal

Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Berikut rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 :

Tabel 3.2. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	97%	98.73%	101.78	Sangat Tinggi	
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72)	BB (73.76)	102.44	Sangat Tinggi	
3.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	SB (90)	B (82)	91.11	Sangat Tinggi	
Jumlah Capaian						295,33		
Rata-rata capaian indikator kinerja						98.44	Sangat Tinggi	

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa keseluruhan indikator kinerja termasuk kategori berhasil dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Tinggi**. Dapat diuraikan Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan nilai target 97% dapat mencapai realisasi pada nilai 98.73% dengan artian capaian kinerja 101.78% yang dapat diartikan kriterianya **Sangat Tinggi**.

Selanjutnya Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD memiliki target kinerja 72 (BB) dengan realisasi sebesar 73.76 (BB) dimana capaian kinerja sebesar 102.44% dengan kriteria **Sangat Tinggi**. Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang dicapai tahun 2025 dapat mencapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan posisi Sangat Tinggi.

Untuk Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan targetnya 90 (SB) dan realisasi 82 (B) dimana capaian kinerja sebesar 91,11% dengan kriteria **Sangat Tinggi**. Secara angka realisasi tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan penghitungan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun sebelumnya

menggunakan google chrome yang artinya menggunakan aplikasi sendiri yang disinkronkan dengan aplikasi Simbangda. Untuk tahun 2025 ini pada bulan September 2025 dari Biro Organisasi menginformasikan bahwa penilaian terhadap tingkat kepuasan pelayanan organisasi menggunakan aplikasi **Sepakat**. Aplikasi Sepakat ini baru digunakan untuk seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 selain pertanyaan yang standar yang bisa digunakan seluruh Perangkat Daerah juga cara responden yang mendaftar tidak ada kata kuncinya. Sehingga siapa saja dapat mengisi kuisisioner bahkan dalam pengisian kuisisioner terlihat sesukanya. Sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk capaian kinerja yang dihasilkan masih berada pada kriteria Sangat Tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas diketahui bahwa 3 indikator kinerja sasaran strategis tercapai dengan range $91\% \leq 100\%$. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 94,44% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan Sumatera Barat melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 telah dilakukan dengan klasifikasi berhasil dengan kategori **Sangat Tinggi**.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2025 dengan realisasinya selama tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2,

selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

3.3.1 Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah dasar terbentuknya Biro Administrasi Pembangunan. Selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan di perbaharui dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun Tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan *“membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan”*.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut maka Biro Administrasi Pembangunan juga diberikan target dan indikator pengendalian administrasi pembangunan. Dimana hal ini juga sudah dituangkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu pada misi 7 (tujuh). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah dirumuskan visi Kepala Daerah yaitu **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan** yang didukung melalui 7 misi. Pada Misi ke 7 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan**

pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, yang memiliki tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Kepala Daerah merumuskan 3 sasaran kinerja yang salah satunya yaitu terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan melakukan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi dari Biro Administrasi Pembangunan diberikan tujuan yaitu melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang didukung oleh 3 sasaran strategis yaitu :

- 1) Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

a. Dasar Penetapan Indikator Kinerja

Biro Administrasi Pembangunan mendukung misi 7 (tujuh) pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas yang juga ditetapkan pada Renstra Biro Administrasi Pembangunan dengan sasaran strategis pertama yaitu *Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal*.

Target untuk Tahun 2025 pada sasaran 1 ini ditetapkan berdasarkan dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang juga sudah dituangkan pada Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan nilai 94%. Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil capaian indikator kinerja selama tiga tahun berturut-turut dan hasil indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan dan RPJMD sehingga setelah dilakukan evaluasi oleh Tim dari Biro Organisasi maka untuk target kinerja tahun 2025 dari 94% menjadi 97%, Kondisi ini sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025.

b. Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis ini memiliki Indikator kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan artian bahwa pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan hasil sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1. 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	97	98.73	101.78	Sangat Tinggi	
Rata-rata capaian indikator kinerja					101.78	Sangat Tinggi	

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 101,78% dengan kategori **sangat tinggi**. Pencapaian Indeks Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 97% dengan realisasi 98.73% di tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas dan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan maka Biro Administrasi Pembangunan yang telah dilakukan termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi dengan nilai 98.73%. Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan aplikasi Simbangda yang mana Biro Administrasi Pembangunan sebagai Perangkat Daerah di Provinsi melakukan pengendalian administrasi pembangunan dengan melakukan validasi setiap evidence yang disampaikan Perangkat Daerah dan menjadi bukti tertib pelaksanaan administrasi.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a). Sumber Data

Data bersumber dari Aplikasi Simbangda Berbasis Evidence yang menjadi acuan dalam memperoleh hasil penginputan pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan laporan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya. Dari penginputan yang dilakukan Perangkat Daerah akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh helpdesk terhadap evidence yang di upload, dari hasil upload tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh helpdesk Biro Administrasi Pembangunan. Hasil verifikasi dan validasi menghasilkan data realisasi fisik dan keuangan masing-masing sub kegiatan serta **Tabel Statistik Evidence** sebagai hasil disetujui atau tidak disetujuinya evidence yang di upload. Tabel Statistik Evidence merupakan hasil dari evidence/dokumen-dokumen yang sudah diupload dan disetujui keabsahan dokumen sebagai bukti dukung kegiatan oleh operator masing-masing Perangkat Daerah. Data dari tabel statistik evidence tersebut diperoleh hasil Indikator kinerja dari Sasaran Strategis Pertama yaitu "**Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**".

b). Metodologi Perhitungan

Untuk memperoleh angka Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dilakukan dengan cara penginputan dokumen pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 oleh setiap operator Perangkat Daerah dan selanjutnya di verifikasi dan validasi oleh helpdesk masing-masing perangkat daerah. Adapun tahapan penginputan yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD Provinsi Sumatera Barat) sebagai berikut :

- i. Upload Data Perencanaan yang terdiri dari : KAK, RUP, HPS, Rapat-rapat persiapan awal kegiatan.

- ii. Upload Data Pelaksanaan yang terdiri dari : Kontrak, SK Tim, Dokumen lelang, dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, rapat-rapat pelaksanaan kegiatan
- iii. Upload Data Pelaporan yang terdiri dari : laporan serah terima kegiatan, Laporan Akhir masing-masing sub kegiatan
- iv. Ketepatan waktu masing-masing OPD melaksanakan upload evidence pada aplikasi Simbangda (paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya).

Hasil penginputan tersebut akan di verifikasi dan validasi oleh helpdesk dan selanjutnya hasil yang disetujui hasil validasi akan muncul pada tabel statistik evidence seperti tabel berikut :

**Statistika evidence
Januari sampai Desember
Tahun 2025**

No	SKPD	Helpdesk	Total paket	Evidence				
				Di Upload	Belum Validasi		Disetujui	Ditolak
					Swakejola	Penyedia		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Yoval Eka Putra	62	565	0	0	563	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Lisma Oktavia, SE, M.Si	75	619	0	0	609	10
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Yoval Eka Putra	51	239	0	0	239	0
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1. Yoval Eka Putra	50	361	0	0	346	3
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1. Lisma Oktavia, SE, M.Si	38	381	0	0	377	4
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1. Yoval Eka Putra, SH	63	391	0	0	391	0
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	1. Yoval Eka Putra, SH	3	19	0	0	19	0
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Yoval Eka Putra	65	521	0	0	521	0
9	BADAN PENGHUBUNG	1. Yoval Eka Putra	27	204	0	0	202	2
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Niswen, A.Md	69	554	0	0	554	0
11	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1. Yoval Eka Putra	19	188	0	0	165	0
12	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	1. DELVI SUKRI	59	457	0	0	457	0
13	BIRO HUKUM	1. M IKHSAN NOVIANDI, S.STP, M.Si	26	279	0	0	279	0
14	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Zulkifli	71	705	0	0	617	7
15	BIRO ORGANISASI	1. Niswen, A.Md	23	195	0	0	195	0
16	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Rahmi Dewi, ST, MM	43	406	0	0	406	0
17	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Akmal Rusli, SE	41	303	0	0	303	0
18	BIRO PEREKONOMIAN	1. Laura Nurwinda	40	345	0	0	345	0
19	BIRO UMUM	1. Zulkifli	58	675	0	8	667	0
20	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1. Rahmi Dewi, ST, MM	370	4136	0	1	4001	0
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	29	320	0	6	314	0
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1. Niswen, A.Md	55	342	0	0	342	0
23	DINAS KEBUDAYAAN	1. Lisma Oktavia, SE, M.Si	141	1012	0	0	1006	6
24	DINAS KEHUTANAN	1. Ibnu Razi Putra Darsil, S.STP, M.M	345	2618	9	0	2604	5
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Yoval Eka Putra	123	987	0	0	987	0
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Yoval Eka Putra, SH	57	477	0	0	472	5
27	DINAS KESEHATAN	1. Rahmi Dewi, ST, MM	189	1350	2	0	1338	10
28	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1. DELVI SUKRI	66	608	0	0	608	0
29	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. ARRENDY IKHSAN, S.STP	91	805	0	0	805	0
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. ARRENDY IKHSAN, S.STP	129	1029	13	0	1016	0
31	DINAS PANGAN	1. Akmal Rusli, SE	101	588	38	0	533	17
32	DINAS PARIWISATA	1. Ekho Wisa	50	368	0	0	368	0
33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Rahmi Dewi, ST, MM	42	306	30	0	276	0

34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. DELVI SUKRI	63	517	8	2	507	0
35	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1. M. IKHSAN NOVIANDI, S.STP, M.Si	138	976	0	0	976	0
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1. Lisma Oktavia, SE, M.Si	50	434	2	0	432	0
37	DINAS PENDIDIKAN	1. MUHAMMAD FAJRI ZALMI, S.STP, M.Si	607	3602	0	0	3086	0
38	DINAS PERHUBUNGAN	1. Akmal Rusli, SE	95	494	0	0	494	0
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Amin Elhan	131	1229	0	0	1229	0
40	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1. SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	734	2847	1	66	2738	42
41	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1. SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	837	5290	0	94	5191	5
42	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1. ARRENDY IKHSAN, S.STP	192	1434	0	0	1434	0
43	DINAS SATUAN POLISI PAMONG RAJA	1. M. IKHSAN NOVIANDI, S.STP, M.Si	31	249	0	0	249	0
44	DINAS SOSIAL	1. DELVI SUKRI	372	2866	10	9	2846	1
45	DINAS SUMBAR DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	1. Akmal Rusli, SE	401	2717	0	6	2699	12
46	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. ARRENDY IKHSAN, S.STP	78	533	0	0	533	0
47	INSPEKTORAT	1. Yovai Eka Putra, SH	67	536	0	0	536	0
48	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	1. SYAHRAL MUIS	18	125	0	0	125	0
49	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	1. SYAHRAL MUIS	3	35	0	0	35	0
50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	1. SYAHRAL MUIS	32	406	0	0	406	0
51	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. M. YAMIN, S.H.	1. SYAHRAL MUIS	15	202	0	0	202	0
52	SEKRETARIAT DPRD	1. Lisma Oktavia, SE, M.Si	77	590	0	0	590	0
Total			6612	47435	113	192	46233	129

Processed By IT - Tim Administrasi Pembangunan Tahun 2025
 Posisikan Tanggal 12 Januari 2026 - 11:08:25
 Page 1/1

Berdasarkan tabel statistika evidence diatas dapat dihitung Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH} = \frac{\text{JUMLAH EVIDENCE DISETUJUI}}{\text{JUMLAH EVIDENCE YANG DI UPLOAD}} \times 100\%$$

$$\frac{46233}{47435} \times 100\% = 97,46 \%$$

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTASI KAB/KOTA} = \frac{\text{JUMLAH KAB/KOTA PENYAMPAIAN LAPORAN FISIK DAN KEU}}{\text{JUMLAH SELURUH KAB/KOTA}} \times 100\%$$

$$\frac{19 \text{ kab/kota}}{19 \text{ kab/kota}} \times 100\% = 100 \%$$

Total Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

$$\frac{\text{TOTAL REALISASI TERTIB ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH} + \text{REALISASI TERTIB ADMINISTASI KAB/KOTA}}{2} = \frac{97,46 + 100}{2} = 98,73 \%$$

Hasil akhir dari penginputan evidence pada aplikasi Simbangda akan menjadi hasil akhir dari bukti pelaksanaan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan di lingkup Perangkat Daerah Provinsi. Setiap melakukan input evidence kegiatan akan menghasilkan capaian realisasi fisik dan keuangan setiap pelaksanaan sub kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang dapat juga menjadi pedoman dalam melihat capaian pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan masih melaporkan secara manual ke Biro Administrasi Pembangunan dengan batas waktu tanggal 10 setiap bulannya.

c. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Realisasi dari indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan untuk tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.3.1. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja 2024			Kinerja 2025			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Reallsasi	Capaian	
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	93%	99.95%	107.47%	97%	98.73%	101.78%	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					107.47%			101.78%	
Kriteria Penilaian									Sangat Tinggi

Dari tabel yang disajikan diatas dapat dilihat Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2024 pada sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan memiliki target kinerja 93%

dengan realisasi sebesar 99.95% dengan artian kategori “Baik” serta capaian kinerja 107.47% dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Sedangkan tahun 2025 memiliki target kinerja sebesar 97% dengan realisasi sebesar 98,73% dengan kategori “Baik” serta dengan capaian kinerja sebesar 101.78% yang dapat diartikan dengan kriteria “Sangat Tinggi”.

d. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Taun 2021-2026, bahwa sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan **“Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal”** adalah mendukung tercapainya sasaran kepala daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP sesuai yang dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.3.1. 3 Perbandingan Capaian Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Tahun 2025 dengan Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025 (%)			Target Akhir	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	97	98.73	101.78	95%	103.92
Rata-rata capaian kinerja					101.78		103.92

Capaian kinerja Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Tahun 2025 telah melebihi target Renstra/RPJMD dengan angka sebesar 101,78%. Sedangkan sampai akhir capaian RPJMD dan Renstra, Capaian Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal sebesar 103.92%.

e. Perkembangan Indikator Kinerja Dari Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.3.1. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Realisasi indikator kinerja *Persentase Perangkat Daerah dan*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)					Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	NA	90	91	92	93	97	99.15	99.13	98.62	99.95	98.73	110.16	108.93	107.19	107.47	101.78	
Jumlah Capaian Indikator Kinerja												110.16	108.93	107.19	107.47	101.78		
Kriteria Penilaian												Sangat Tinggi						

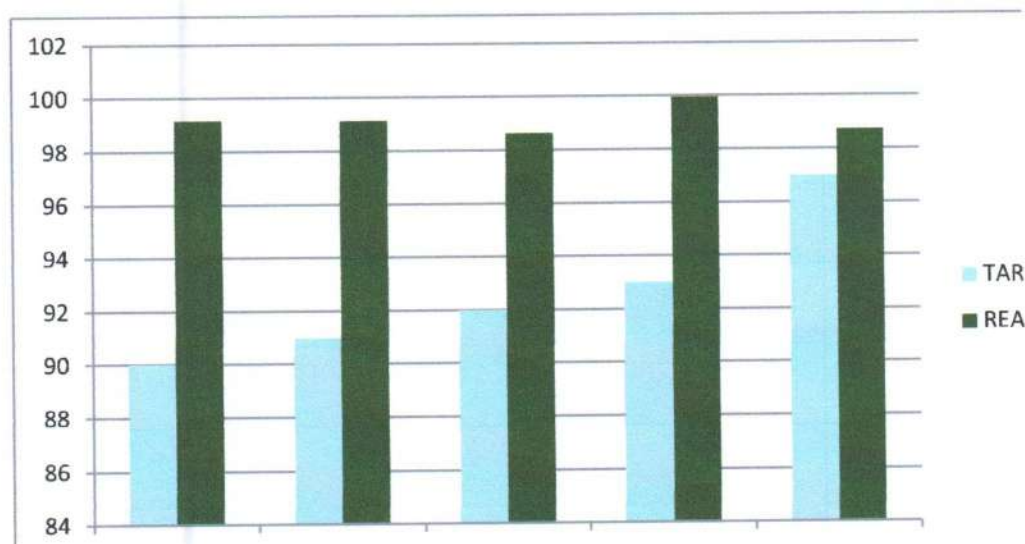
Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebagaimana tercantum pada tabel diatas, hal ini disebabkan karena masih terdapat kekurangan dalam penginputan eviden kegiatan sebagai bukti keabsahan kegiatan sehingga mempengaruhi penghitungan pelaksanaan tertib administrasi kegiatan. Kondisi ini juga sangat mendukung sekali terhadap tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.. Walaupun mengalami penurunan angka realisasi indikator kinerja tetapi masih tetap melebihi target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya sehingga capaian dari indikator kinerja tetap memiliki kriteria "Sangat Tinggi" setiap tahunnya.

Hasil capaian indikator kinerja Tahun 2025 mencapai 101.78% mengalami sedikit penurunan dari pada tahun 2024 yang mencapai 107,47%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 pelaksana kegiatan

sudah mulai aktif untuk melaporkan evidence pekerjaan dan menyebabkan mulai terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat sehingga mempengaruhi juga terhadap pelaksanaan tertib administrasi pembangunan yang menjadi target kinerja ke Biro Administrasi Pembangunan. Selain itu juga terjadi efisiensi kegiatan rapat yang semula rapat offline menjadi rapat online (daring). Selain itu juga efisiensi terhadap anggaran perjalanan dinas.

Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dapat dilihat tingkat keberhasilan pada grafik dibawah ini :

Grafik 2 Sasaran Strategis I Tahun 2021 s.d 2025



Pada grafik diatas dapat diartikan bahwa target dan realisasi sasaran Pertama dengan indikator *Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan* selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan.

f. Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tingkat nasional yang memiliki kesamaan terhadap indikator *Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan* yaitu Provinsi Jawa Tengah pada pola indikatornya memiliki kemiripan dengan Biro Administrasi Pembangunan antara lain: :

- Persentase OPD tertib administrasi pelaksanaan kegiatan
 - Persentase Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan tepat waktu
 - Kepatuhan terhadap standar operasional pengendalian pembangunan
- Secara Nasional Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat karena di Jawa Tengah sudah memiliki sarana yang lebih baik dari pada Provinsi Sumatera barat

g. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dalam melakukan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya sebagai berikut :

- 1) Memastikan setiap saat Perangkat Daerah melakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan aplikasi Simbangda. Untuk Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat paling lambat tanggal 30 atau 31 setiap bulannya sudah upload evidence, sedangkan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 10 setiap bulannya laporan sudah sampai ke Biro Administarsi Pembangunan.

- 2) Melaksanakan rapat evaluasi terhadap capaian realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya mulai dari lingkup asisten dan dilanjutkan rapat Pembangunan yang langsung dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat.
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap paket-paket pekerjaan untuk memperkecil/mengurangi terjadinya pelaksanaan pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, pekerjaan yang tidak selesai tahun sebelumnya sehingga tahun berlangsung dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu.
- 4) Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK, Dekon dan TP secara berkala lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat..
- 5) Melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap capaian pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD, APBN termasuk DAK, Dekon dan TP serta kontrol pelaksanaan kegiatan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi Kabupaten/Kota.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2025, maka Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan alternative tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi melalui desk pengendalian untuk masing-masing OPD secara berkala dengan melibatkan Tim Terpadu
- 2) Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan secara berkala dan secara bertingkat (Rapat Teknis, Rapat per Asisten dan Rapat Pembangunan)
- 3) Monitoring dan Evaluasi secara terpadu dengan OPD lainnya terhadap kegiatan sepanjang dibutuhkan bagi dengan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 4) Fasilitasi melalui desk pengendalian untuk masing-masing OPD penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara berkala
- 5) Koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Keuangan untuk harmonisasi data realisasi DAK, Dekon dan TP secara berkala

h. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup :

1. Sumber Daya Manusia Yang Kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Biro Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di dukung oleh ketersediaan 3 orang pejabat struktural selaku pelaksanaan kegiatan dan dibantu oleh pejabat fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda 3 orang dan Perencana Ahli Muda 3 orang dalam melakukan analisis dan melaksanakan kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

2. Sarana Dan Prasarana Yang Memadai

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Biro Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung dengan sarana komputer dengan menggunakan Aplikasi Simbangda berbasis evidence.

3. Ketersediaan Anggaran Yang Efektif

Dalam rangka mencapai keberhasilan sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Biro Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan target 97% pada tahun 2025 yang telah tercapai sebesar 97.46 % untuk Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota 100%, sehingga diperoleh subtotal Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan adalah 98,73% dengan capaian kinerja dari kedua capaian kinerja indikator sebesar **101.78%**. Untuk mewujudkan sasaran tersebut disediakan anggaran sebesar Rp. 184.520.000,- dengan realisasi sebesar 130.330.000,- atau sebesar 70.63%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.1. 5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan T.A 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBDP 2025	REALISASI		
			Fisik	Keuangan	%
I	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	184.520.000	100	130.330.000	70.63
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	104.770.000	100	77.521.000	73.99
1.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	16.800.000	100	8.496.000	50.57
1.2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.000.000	100	35.195.000	90.24
1.3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	48.970.000	100	33.830.000	69.08
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	79.750.000	100	52.809.000	66.22
2.1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	40.850.000	100	24.895.000	60.94
2.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.200.000	100	24.029.000	95.36
2.3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	13.700.00	100	3.885.000569	28.36

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 184.520.000

CK = Capaian Kinerja (%) = 101,78%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 130.330.000

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.}184.520.000 \times 101,78\%) - \text{Rp.}130.330.000}{\text{Rp.}184.520.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{18.780.445.600 - 1.160.009.660}{\text{Rp.}184.520.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 127,87 \%$$

Dibawah ini cara penghitungan efisiensi:

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{1}{1}(\text{Anggaran} \times \text{Rata}^2 \text{ Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran} : \text{Anggaran} \times 100\%$	$\text{NE} = 90\% + (\text{Efisiensi Kinerja} - 90) \times 10$
Sasaran 1	184.520.000	130.330.000	101,78%	0,31	127,87%

Dari pagu anggaran untuk Sasaran I sebesar Rp. 184.520.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 130.330.000,- dan capaian kinerja mencapai 107,47%. Dalam melaksanakan Sasaran I Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 54.190.000,- (29.37%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja Sasaran I "Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal" dapat disimpulkan bahwa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai efisiensi sebesar 127,87% dengan anggaran yang tersedia diperoleh nilai efisiensi 0,31 yang artinya dengan anggaran Rp. 184.520.000 Biro Administrasi Pembangunan termasuk dapat menggunakan anggaran dengan efisien.

Tabel 3.3.1. 6 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN Rp.	REALISASI ANGGARAN Rp.	CAPAIAN (%)
Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan	Kebijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		Kebijakan administrasi pembangunan yang dihsilkan			184,520,000	130,330,000	70.63
				Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD					
				Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN					
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat	97%	97%	104,770,000	77,521,000	73.99
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov. Sumbar	1 laporan	1 laporan	16,800,000	8,496,000	50.57
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	1 laporan	1 laporan	39,000,000	35,195,000	90.24
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	Persentase realisasi fisik dan keuangan yang bersumber dari APBD Kab/Kota, dana APBN yang diterima Kab/Kota	1 laporan	1 laporan	48,970,000	33,830,000	69.08
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD Prov. Dan Presentase kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan target	97%	97%	79,750,000	52,809,000	66.22
			Analisis capaian kinerja pembangunan daerah	Jumlah hasil analisa triwulan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah	1 dok	1 dok	40,850,000	24,895,000	60.94
			Pelaporan	Jumlah laporan	1	1 laporan			95.35

			pelaksanaan pembangunan daerah	bulanan, triwulan dan tahunan pelaksanaan pembangunan daerah	laporan		25,200,000	24,029,000	
			Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	1 dok	1 dok	13,700,000	3,885,000	28.36

Sumber data : Realisasi rencana aksi kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumbar

Efisiensi yang dilakukan dengan melakukan penghematan terhadap penggunaan kertas, mengurangi rapat-rapat secara langsung dengan mengganti rapat-rapat secara daring dan melakukan perjalanan dinas sesuai penting tidaknya perjalanan dinas yang dilakukan.

3.3.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada Tata Kelola Organisasi.

a. Dasar Penetapan Indikator Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi merupakan wujud dari pencapaian misi ke tujuh pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dimana sasaran ini dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan. Sasaran ini merupakan hasil dari evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Target untuk Tahun 2024 pada sasaran ini ditetapkan berdasarkan dari Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan target nilai BB (72) dan sedangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025 target tetap ditargetkan 72. Hal ini sesuai dengan saran Tim verifikasi Sakip karena kenaikan nilai Laporan Kinerja tidak akan terlalu besar setiap tahunnya.

Sasaran Strategis ini memiliki Indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang nilainya didapat dari evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2. 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	72 (BB)	73.76 (BB)	102.44

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 102.44%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini akan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan ke-2 Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu 1) **Nilai Akuntabilitas Kinerja** dan 2) **Tingkat Kepuasan**

terhadap Pelayanan Organisasi. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Sumber Data

Data bersumber dari Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025 dimana pelaksanaan review ini dilakukan berdasarkan data akuntabilitas dari Biro Administrasi Pembangunan selama tahun 2025 dan dilakukan evaluasi oleh Instansi terkait yang berwenang dalam pemberian nilai tersebut. Selain itu dalam pencapaian sasaran kinerja ini juga didukung oleh data primer dari pengolahan kuisioner dari indeks pelayanan dalam menjalankan aplikasi Simbangda Berbasis Evidence selama tahun 2025.

b. Metodologi Perhitungan

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan Reviu dan Wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat yang dievaluasi, melalui penerapan dokumen-dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Matrik 5 (lima) Tahunan, Laporan Kinerja (LKJ) dan dokumen lainnya sebagai bukti fisik.

b. Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis II memiliki Indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan artinya bahwa Biro Administrasi Pembangunan berupaya untuk mencapai kinerja sasaran dengan meningkatkan kinerja ditahun 2025 dengan memenuhi semua persyaratan dokumen yang diminta sebagai bukti dukung dalam pelaksanaan evaluasi kinerja biro.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis tersebut dengan uraian sebagai berikut:

c. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Realisasi dari indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 3.3.2. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	KINERJA 2024			KINERJA 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	72 (BB)	70,71 (BB)	98,20%	72 (BB)	73.76 (BB)	102.44%

Dari tabel yang disajikan dapat dilihat Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2024 pada sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja memiliki target nilai 72 dan realisasi 70,71 dengan capaian kinerja 2024 98,20%. Tahun 2025 target tetap di 72 dengan realisasi 73.76 dan capaian kinerja 2025 102.44%. Penetapan target tahun 2025 masih dilakukan sama dengan tahun 2024 dikhawatirkan tidak tercapai target kinerja *Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2025*, karena biasanya setiap melakukan evaluasi oleh Inspektorat terjadi perubahan sistem input laporan kinerja OPD dan bisa mempengaruhi hasil capaian kinerja OPD. Biro Administrasi Pembangunan memutuskan tetap menggunakan target 72 “BB” dengan harapan capaian kinerja untuk tahun 2025 dapat tercapai atau bisa melebihi target.

d. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Biro Administrasi Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk sasaran strategis dengan target untuk tahun 2025 dengan nilai 72 (BB). Sedangkan dari target Biro Administrasi Pembangunan pada Renstra yaitu dari tahun 2021 s.d 2026 yaitu dengan nilai BB sedangkan pada tahun 2026 target nilai yang diberikan yaitu A sedangkan realisasi dari target tersebut sampai dengan tahun 2025 yaitu 73.76 dimana ini masih berproses dalam pencapaian targetnya sampai dengan akhir periode

RPJMD yaitu tahun 2026 dengan target yang harus di capai yaitu nilai A dan sasaran strategis ini akan masih berproses sampai dengan tahun 2026.

e. Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Nilai SAKIP secara Nasional tidak ada yang bisa dijadikan pembandingan di kemeterian. Biro Administrasi Pembangunan tahun 2025 dapat melakukan pembandingan dengan nilai SAKIP Provinsi Sumatera Barat yang mana nilai SAKIP nya 78,85 (BB), sedangkan Biro Administrasi Pembangunan memperoleh nilai 73,76 (BB) dimana nilainya masih jauh di bawah nilai SAKIP Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat posisi nilai SAKIP Biro Administrasi Pembangunan berapa pada posisi nomor urut ke 6 (enam) dari 9 (sembilan) Biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.2. 3 Nilai SAKIP Tahun 2025 lingkup Setda Provinsi Sumatera Barat

No	Nama	Nilai SAKIP 2025
1	Biro Umum	75.19 (BB)
2	Biro Organisasi	82.37 (AA)
3	Biro Administrasi Pimpinan	79.28 (BB)
4	Biro Pemerintahan	76.02 (BB)
5	Biro Perekonomian	75.89 (BB)
6	Biro Administrasi Pembangunan	73.76 (BB)
7	Biro Hukum	73.68 (BB)
8	Biro Kesejahteraan Rakyat	71.44 (BB)
9	Biro Pengadaan Barang/Jasa	70.85 (BB)

Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

f. Perbandingan realisasi kinerja dan Target kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

Tahun 2021 dimana dilaksanakannya evaluasi SAKIP yaitu dengan kondisi masih Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Provinsi Sumatera diberikan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu nilai 59,81 (CC) sehingga pada tahun 2021 masih belum terpenuhi target Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yaitu B. Pada Tahun 2022 diberikan nilai 60,08 (B) dengan target 61 (B), hasil penilaian masih belum mencapai target karena yang dilakukan penilaian evaluasi kinerja adalah 2 OPD yaitu Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau serta Biro Administrasi Pembangunan sehingga sulit mengukur kinerja dengan perubahan tugas pokok dan fungsi dan tidak ada pembandingan terhadap kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 yang dievaluasi yaitu data tahun 2022 dengan target 65 (B) dan mendapatkan realisasi sebesar 70,16 (BB), dimana untuk tahun 2023 target sudah terpenuhi. Kemudian untuk tahun 2024 dengan target 72 (BB) dan mendapatkan realisasi sebesar 70,71 (BB) sehingga di tahun 2025 target tetap di nilai 72 (BB) mendapatkan realisasi 73.76 sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 102,44%. Untuk Tahun 2025 target tidak dinaikan dari tahun 2024 karena tahun 2024 target yang ditetapkan tidak tercapai sehingga diputuskan oleh tim evaluasi Sakip untuk target 2025 tetap diangka 72. Pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan target masih kurang maka akan terus diperbaiki seiring dengan perubahan indikator pada Biro Administrasi Pembangunan karena akan dilakukan perubahan Rencana Strategis nantinya.

Tabel 3.3.2. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	KINERJA 2021			KINERJA 2022			KINERJA 2023			KINERJA 2024			KINERJA 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
tingkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	60	59,81	99.68%	61	60,08	98.49%	65	70,16	107,94 %	72	70,71	98,20 %	72	73.76	102.44

Berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan hasil evaluasi SAKIP mulai dari Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sampai menjadi Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2021 yaitu dokumen yang dievaluasi yaitu dokumen tahun 2020 dimana Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dengan realisasi nilai SAKIP 59,81 (CC) dari target nilai SAKIP 60 (B) dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 18,77% dimana perencanaan kinerja sudah mulai tersusun seperti Renstra telah memuat tujuan tapi masih terdapat kekurangan. IKU sudah disusun namun tidak selaras dengan Renstra
- B. Pengukuran Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 15,49% dimana pengumpulan data kinerja sebagai dasar penetapan dan penilaian capaian kinerja dilakukan melalui permintaan belum terdapat pedoman atau SOP. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- C. Pelaporan Kinerja : Nilai evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar 9,62% masih terdapat kekurangan penyajian informasi kinerja dan laporan kinerja, dimana angka yang disajikan belum akurat dan konsisten dalam mengukur capaian kinerja.
- D. Evaluasi Internal : Nilai hasil evaluasi terhadap evaluasi internal sebesar 6,19% dimana evaluasi internal yang dilaksanakan hanya sebatas evaluasi program dan kegiatan serta evaluasi terhadap capaian realisasi fisik dan keuangan namun hasil evaluasi belum terlalu berpengaruh terhadap perbaikan kualitas perencanaan
- E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi : Nilai hasil evaluasi terhadap Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sebesar 9,75% dimana terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerjasudaj tercapai dengan rata-rata capaian di atas 100% namun capaian kinerja dibandingkan

dengan tahun sebelumnya terdapat 1 (satu) sasaran strategis mengalami penurunan.

Kemudian untuk tahun 2022 (dokumen yang dievaluasi adalah dokumen tahun 2021) dari instansi terkait untuk Biro Administrasi Pembangunan didapatkan hasil sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 18,79 dimana perencanaan kinerja sudah baik, dimana Renstra sudah disusun dan ealh memuat tujuan, namun masih ada yang belum berorientasi hasil (outcome) seperti tujuan meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan.
- B. Pengukuran Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 15,07 dimana Indiaktor Kinerja Utaman (IKU) sudah namun belum cukup dijadikan untuk mengukur kinerja karena belum memenuhi kriteria yang seharusnya. Indikator kinerja eselon III dan IV belum keseluruhannya selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- C. Pelaporan Kinerja : Nilai evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar 10,15 dimana Biro Administrasi Pembangunan sudah menyusun Laporan Kinerja dan sudah disampaikan batas waktu yang ditetapkan, Capaian yang disajikan tentang pencapaian IKU masih perlu perbaikan agar menggambarkan hubungan kuasalitas antara outcome, output, process dan input dan telah di upload di website Biro Administrasi Pembangunan.
- D. Evaluasi Internal : Nilai hasil evaluasi terhadap evaluasi internal sebeasr 6,19 dimana telah dilakukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja melalui Rencana aksi telah dievaluasi dengan kriteria terdapat informasi tentang capaian hasil rencana simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana serta terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan.
- E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi : Nilai hasil evaluasi terhadap Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sebesar 9,88 dimana Target

Kinerja Biro Administrasi Pembangunan dibagi menjadi 2 (dua) perjanjian kinerja yang mana untuk kinerja Januari s.d Mei 2021 capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 43,57%. Untuk perjanjian kinerja Juni s.d Desember capaian indikator kinerja 110,16%

Sedangkan untuk 2023 dimana dokumen yang dilakukan evaluasi yaitu dokumen tahun 2022 dimana Biro Administrasi Pembangunan realisasi nilai SAKIP 70,16 (BB) dari target nilai SAKIP 65 (B) dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 26,42 dimana perencanaan kinerja sudah dibuat yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) eselon 2 seluruh dokumen perencanaan kinerja sudah dipublikasikan pada web site Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- B. Pengukuran Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 20,28 dimana Biro Administrasi Pembangunan telah membuat pedoman teknis berupa SOP Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja, dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja. Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berkala yaitu melalui realisasi rencana aksi setiap triwulan
- C. Pelaporan Kinerja : Nilai evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar 10,85 dimana Biro Administrasi Pembangunan sudah menyusun Laporan Kinerja dan sudah disampaikan batas waktu yang ditetapkan, Sistematika penulisan Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian yaitu belum sepenuhnya menyajikan seluruh informasi tentang capaian kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terhadap evaluasi internal sebesar 12,62 dimana telah menyusun SOP pemantaun capain kinerja internal dan telah dilakukan secara berjenjang terhadap seluruh unit kerja/bidang/sub bidang dan ada beberapa catatan yaitu : laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang didokumentasikan dalam bentuk notulen rapat monitoring dan evaluasi belum menyajaiakan rekomendasi perbaikan pengukuran capaian perjanjian kinerja dan informasi capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 (dokumen yang dievaluasi adalah dokumen tahun 2023) dari instansi terkait untuk Biro Administrasi Pembangunan didapatkan hasil sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 24,39 dimana perencanaan kinerja sudah baik, dimana Renstra dan Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja), Perencanaan aktivitas pendukung kinerja yaitu rencana aksi dan perencanaan anggaran yaitu DPA telah dibuat. Catatan yang menjad perhatian bahwa target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapatdicapai (Achievable), kurang menantang dan kurang realistis. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang lebih baik.
- B. Pengukuran Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 21,18 dimana Biro Administrasi Pembangunan telah menyusun SOP Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- C. Pelaporan Kinerja : Nilai evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebear 10,43 dimana Biro Administrasi Pembangunan sudah menyusun

Laporan Kinerja dan sudah disampaikan batas waktu yang ditetapkan, Sistematika penulisa Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian yaitu belum menyajikan informasi efisiensi secara kuantitatif terhadap penggunaan sumber daya yang telah dilakukan pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran.

- D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terhadap evaluasi internal sebesar 14,71 dimana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah melalukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi, dengan mengacu kepada SOP yang telah ditetapkan akan tetapi beberapa catatan yaitu pemantauan capaian kinerja internal belum dilakukan secara berjenjang sampai level individu serta belum dilakukan pemantauan oleh SDM yang memadai sehingga belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dimana hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuaian aktivitas belum dilaksanakan ssecara rutin setiap bulan.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 (dokumen yang dievaluasi adalah dokumen tahun 2024) dari instansi terkait untuk Biro Administrasi Pembangunan didapatkan hasil sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 24,62 dimana perencanaan kinerja sudah baik, dimana Renstra dan Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja), Perencanaan aktivitas pendukung kinerja yaitu rencana aksi dan perencanaan anggaran yaitu DPA telah dibuat. Catatan yang menjadi perhatian bahwa target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai dengan baik. Dokumen pemantauan

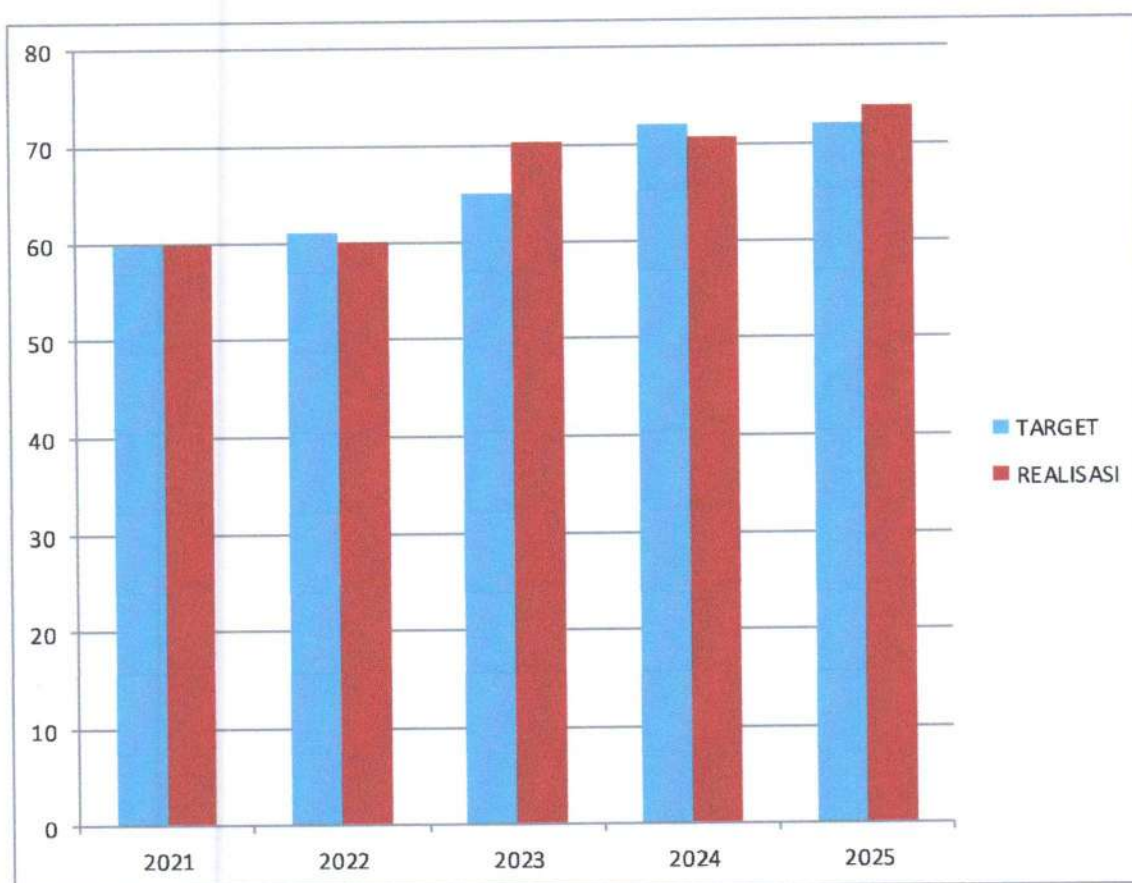
kinerja belum menjelaskan rekomendasi perbaikan/penyempurnaan untuk merevisi rencana aksi Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang lebih baik. Belum seluruh pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

- B. Pengukuran Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 22,25 dimana Biro Administrasi Pembangunan telah menyusun SOP Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- C. Pelaporan Kinerja : Nilai evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar 11,56 dimana Biro Administrasi Pembangunan sudah menyusun Laporan Kinerja dan sudah disampaikan batas waktu yang ditetapkan, Sistematika penulisan Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian yaitu belum menyajikan informasi efisiensi secara kuantitatif terhadap penggunaan sumber daya yang telah dilakukan pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran.
- D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terhadap evaluasi internal sebesar 15,33 dimana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi, dengan mengacu kepada SOP yang telah ditetapkan akan tetapi beberapa catatan yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pemahaman mendalam. Perlu dilakukan perbaikan terhadap dokumen laporan

monitoring/rapa-rapat. Pemantauan capaian kinerja internal belum dilakukan secara berjenjang sampai level individu serta belum dilakukan pemantauan oleh SDM. Mengoptimalkan emnafaatan dokumen perencanaan sebagai alat pengendalian administrasi kinerja.

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat nilainya pada grafiknya dibawah ini :

Grafik 3 Sasaran Strategis II Tahun 2021 s.d 2025



Pada grafik diatas dapat diartikan bahwa realisasi yang dicapai tahun 2023 dan tahun 2025 yang melebihi target sedangkan tahun 2021, 2022 dan 2024

masih belum tercapai target. Tahun 2025 sudah melebihi target yang sudah ditetapkan.

g. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan

Adapun penyebab dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Adanya keselarasan antara perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sehingga kebutuhan dokumen evaluasi untuk SAKIP dapat terpenuhi.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang baik dalam memilih program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam sinergisitas antara perencanaan dengan penganggaran.
4. Adanya peningkatan penginputan evidence kegiatan pada aplikasi Simbangda oleh Perangkat Daerah Provinsi dan tepat waktunya penyerahan laporan dari Kabupaten/Kota..
5. Pelaksanaan rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan lingkup asisten dan dilanjutkan ke tingkat Pembangunan (gubernur) yang dilakukan setiap bulannya,
6. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi sehingga pencapaian target dapat dipenuhi untuk SAKIP Biro Administrasi Pembangunan.
7. Adanya dukungan dari bagian-bagian untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian SAKIP Biro Administrasi Pembangunan.

Disamping itu, upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Menyusun dokumen perencanaan yang bersinergi dengan penganggaran sehingga dapat saling mendukung pelaksanaan kegiatan.
2. Mensortir semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran

3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi dari ASN dalam menyusun dan melaksanakan akuntabilitas kinerja
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.
5. Membuat Standar Pelayanan terhadap pelayanan internal organisasi
6. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelayanan internal.

h. Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi dengan dua kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sementara kegiatan yang lain juga saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

Sasaran Strategis II Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi didukung dengan 1 Program dan 2 Kegiatan serta dengan 3 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 17.493.120,- Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 16.834.000,- atau sebesar 90.58%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 659.120,- (9.42%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (102,44%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (90.58%) sehingga dapat dihitung efisiensi anggaran sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 772.069.981

CK = Capaian Kinerja (%) = 102.44%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 753.468.930

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.772.069.981} \times 102.44\%) - \text{Rp. 753.468.930}}{\text{Rp. 772.069.981}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{79.090.848.853 - 753.468.930}{\text{Rp. 772.069.981}} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = 62,04 %

Cara menghitung efisiensi :

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja		Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%) NE= 90% + (Efisiensi Kinerja/20 * 90)
				(Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran	Anggaran x 100%	
Sasaran 2	754.578.861	736.634.930	102.44%	0.05		62.04%

Dari pagu anggaran untuk Sasaran II sebesar Rp. 17.493.120,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.834.000,- dengan realisasi 90.58% dan capaian kinerja mencapai 102.44%. Dalam melaksanakan Sasaran II Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi terdapat melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 659.120,- (9.42%) dengan nilai efisiensi sebesar 62,04% dan efisiensi kinerja sebesar 0,05 yang artinya dengan anggaran Rp. 17.493.120,- Biro Administrasi Pembangunan termasuk dapat menggunakan anggaran dengan efisien.

Efisiensi yang dilakukan dengan melakukan penghematan terhadap penggunaan kertas, mengurangi rapat-rapat secara langsung dan melakukan perjalanan dinas sesuai penting tidaknya perjalanan dinas yang dilakukan.

Tabel 3.3.2. 5 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN Rp.	REALISASI ANGGARAN Rp.	CAPAIAN (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					17,493,120	16,834,000	90.58

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	15,523,200	15,202,000	98.32
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	3,283,200	3,250,000	98.99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	12,240,000	11,952,000	97.65
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	1,969,920	1,632,000	82.85
	Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1,969,920	1,632,000	82.85

3.3.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dimana untuk menjalankan Permendagri ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat langsung menyusun Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang kemudian terdapat juga beberapa kali mengalami perubahan. Peraturan Gubernur yang disusun ini salah satunya menyusun Tugas Pokok dan Fungsi dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pelayanan kepada Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.

Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi serupakan sasaran ke 3 (tiga) bagi Biro Administrasi Pembangunan. Dimana juga tertuang dalam

Renstra 2021- 2026 dan Renja tahun 2025, sehingga pada RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk pada misi 7 (tujuh).

a. Dasar Penetapan Indikator Kinerja

Biro Administrasi Pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mendukung misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta berkualitas sehingga untuk sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator **Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi**.

Target untuk tahun 2025 pada sasaran strategis sudah ditetapkan dan juga sudah dituangkan dalam Renstra dan Renja Biro Administrasi Pembangunan, adapun target tahun 2025 indikator kinerja sebesar 90 (Sangat Baik). Pada saat pelaksanaan pelayanan maka diperoleh realisasi indikator kinerja terhadap sasaran ke 3 (tiga) seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.3. 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran III

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.	90	82	91,11

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 91,11% dengan kategori memuaskan. Pencapaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target nilai 90 dengan realisasi nilai diangka 82 di tahun 2025 ini dan capaian ini dikategorikan kedalam capaian yang **Baik** sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI	KINERJA PELAYANAN
1.	25,00 - 64,99	Tidak Baik

2.	65,00 - 76,60	Kurang Baik
3.	76,61 - 88,30	Baik
4.	88,31 - 100	Sangat Baik

b. Sumber Data

Data bersumber dari data primer yaitu penyebaran kuisoner melalui Aplikasi "SEPakat" yang diinformasikan ke grup Whatsapp Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Banyaknya kuisoner yang disebar kemudian kuisoner tersebut diolah dan dilakukan penghitungan sesuai dengan arahan dari Permenpan Nomor 14 Tahun 2017.

c. Metodologi Perhitungan

Pengukuran kualitas pelayanan organisasi pada Biro Administrasi Pembangunan melalui pengisian kuisoner kepada Perangkat Daerah (OPD Provinsi) dan Kabupaten/Kota sebagai OPD yang dilayani oleh Biro Administrasi Pembangunan. Adapun jumlah Kuisoner yang disampaikan berjumlah 9 pertanyaan.

Responden yang diberikan kuisoner dibagikan kepada 50 OPD Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota. Dari kuisoner yang diberikan dapat dilakukan rekapitulasi sebagai bahan untuk memperoleh nilai tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan Biro. Adapun beberapa unsur yang dipertanyakan pada kuisoner sebagai berikut :

- a. Prosedur pelayanan
- b. Persyaratan dan jenis pelayanan
- c. Kesesuaian persyaratan
- d. Kejelasan informasi
- e. Jumlah personil yang melayani
- f. Sarana pendukung dstnya

Dari unsur pertanyaan yang dijawab pada kuisisioner tersebut akan memperoleh hasil responden kuisisioner yang akan dipergunakan sebagai indikator kinerja biro. Responden yang mengisi kuisisioner survey pelayanan kepuasan berjumlah 129 orang dengan rekapitulasi pengisian kuisisioner sebagai berikut :

Tabel 3.3.3. 2 Tabel Rekapitulasi Kuisisioner

PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2025

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	1302121904830002	Abdul Rahim	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	1301046702700002	VARINEL YANTI	3	1	2	4	3	3	3	2	3
3	1301056610690001	Risma yelli	3	3	3	3	3	3	3	2	3
4	1301045807760002	Putri Yenti	3	3	3	3	3	3	3	3	4
5	1375021310730002	Deltismi	3	3	3	3	3	3	3	3	4
6	1310047006920008	Alfha Vionita	3	3	3	3	3	3	3	3	4
7	1571042301860061	Riki Yanto	3	4	3	4	3	3	4	4	4
8	1312041301930001	Alan Riadi	4	3	4	3	3	4	4	4	4
9	081267739542	Azmi Nur	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	085220031967	M. Fajri Z	3	3	3	4	3	3	3	3	4
11	082268683270	DEDEF HELMA PUTRI	3	3	4	4	4	4	4	4	4
12	083195801101	Warhamni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	081374273234	Ohma Dhamendra	3	3	3	3	3	3	3	3	1
14	081363455700	Nofyelni	3	2	3	3	2	3	3	2	4
15	085263636000	YULITA USNI ZETRI	3	3	3	4	4	4	4	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
16	082287171067	Emi Yunita	3	3	3	3	3	3	3	3	4
17	082169778413	Isrok Triana Audi	4	4	4	3	3	3	4	3	3
18	082287063638	Yandri Aditya putra	3	3	3	4	3	3	2	3	3
19	083878907534	Yuhandi nata	4	3	3	4	3	3	3	3	3
20	081378800814	Melisa Kurniawati	4	4	3	4	3	4	4	4	4
21	08126788894	Aprinal	3	3	3	3	3	3	3	2	4
22	082111060407	Nasrullah Sudirman	4	3	3	3	3	3	3	3	4
23	083113109818	Ana nuryana	4	4	4	3	3	4	3	3	4
24	085104802194	IDA SOVIANTI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	085263717861	Mira Widya	3	2	2	2	2	3	2	2	2
26	081275633753	Nadia Andani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	082285031521	Muhammad ismi	3	4	3	3	3	4	4	3	3
28	083841970033	Mona	3	3	3	4	3	3	3	3	4
29	085263668755	Edi warman	3	3	3	2	3	3	3	2	3
30	081363101400	Nursyamsi	3	3	2	2	3	2	3	3	2
31	085355141878	Diani roza	3	3	3	4	3	3	3	2	1
32	081363258668	Zainul Amra. ST	3	3	2	3	3	2	2	2	3
33	081363747731	Maya Masitah	4	3	3	3	3	3	3	2	3

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
34	081219732452	Riri Elfira	3	3	3	4	3	3	3	3	4
35	081212953593	Musniar MD	3	3	3	3	3	3	3	2	4
36	081286044060	Rina Amir	3	3	3	3	3	3	3	3	4
37	083140756329	Gilang Firman Syah	3	3	2	3	3	3	3	2	3
38	083181228168	Anggi Kurnia Wulandari	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39	082173841815	THOMAS SUKARIANTO HARAH	4	4	4	4	3	3	4	3	4
40	08126806234	Amrizal	3	1	1	3	2	3	3	3	4
41	082169878787	Amin Elhan	4	3	3	3	3	3	3	3	3
42	082284266268	Dra. LAURA NURWINDA, M.Si	4	4	4	4	4	3	4	4	4
43	083801474316	Lindawati	3	3	3	2	2	1	3	3	3
44	081363464661	Dora	3	4	3	3	3	4	3	3	4
45	081363144363	Nasrul Mansur	3	4	3	4	4	3	3	3	3
46	081372084334	Neneng Sriwahyuni	3	3	3	4	3	3	3	3	3
47	081218469900	Rica andriani	3	3	3	2	3	3	3	3	3
48	083876911827	Ratna dewi	3	3	3	2	3	2	3	3	3
49	082389501213	Zefni	1	3	3	4	3	3	3	3	3
50	082390721644	GUSRI ELFAISHAL	4	4	3	4	3	4	3	2	4
51	085376740500	Imelda	3	3	3	4	3	3	3	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
52	081363497579	Muhammad taufik	3	3	3	3	3	4	4	3	3
53	082284600225	Ricky camova	4	3	3	4	3	3	3	3	4
54	081266343729	Jonizar, SH	3	3	3	4	3	3	3	2	3
55	082256091473	Yulya Citra	3	4	3	3	3	3	3	3	3
56	082287600883	Salma Dwiana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	081374388722	YASMIN, SE, MM	4	4	3	4	4	3	3	3	4
58	082385176059	Hatika Haura	3	3	3	3	3	3	4	4	3
59	085763815134	Kanza Julia Maharani	3	3	3	3	3	4	3	3	3
60	085263904194	Alif saputra	3	4	4	4	4	4	4	4	4
61	082171808106	Sekar Sari	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	081364123567	Feri yanto	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	082285913538	Ahmad dzaki	4	3	3	4	4	4	4	4	4
64	081275710329	Khairatun Anisa	4	3	4	4	4	3	4	3	4
65	082384793885	Lola Amanda	3	3	3	3	3	3	3	3	4
66	081374248173	muhammad rachel alfandi	3	3	3	3	3	3	3	3	3
67	081363502123	Firman	4	4	4	3	2	3	3	2	1
68	082169559003	Lovella Tri Cania	3	3	3	3	3	3	3	3	3
69	081395525060	Ananda Nabilla Yuani	3	3	3	3	3	4	3	3	3

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
70	081374592786	Reva Kurnia Dewita	2	3	2	4	3	3	3	3	3
71	081371537093	Alda siswenda putri	4	4	3	4	3	4	4	4	4
72	082384196123	Wiwit firdaus	3	3	3	4	3	4	4	4	4
73	081266748999	Nofrizal	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	081266937070	Jumadillia Azhari	3	3	2	2	3	3	3	2	2
75	082386423100	ONGKY YON SAPUTRA	2	2	3	2	3	3	3	2	3
76	082268325321	annisa adelia junika	3	4	4	3	4	4	3	3	3
77	08126742496	Agusril	4	3	3	4	3	3	3	3	4
78	082283859718	Vikos yp	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	081378575594	Gusmardi amir	4	3	3	3	3	3	3	3	4
80	085265024332	CITRA APRO AMOR	3	3	3	4	3	3	3	3	3
81	081374676885	Nelia irawati	3	3	3	4	4	4	3	4	4
82	087808755641	Annisa Fitriana Rahma Putri	4	4	4	4	4	4	3	4	4
83	081266556161	R IBNU RAMADININGRAT	4	4	4	4	2	4	4	4	4
84	083171714353	Yoval Eka Putra	3	3	3	3	3	3	3	3	3
85	197206092007011005	Hendra Bukti.SH	3	2	2	4	2	3	2	2	3
86	081266663766	IRFAN MALIN MUDO, S.Sos	3	2	3	2	3	2	3	2	2
87	082268240602	FISKA APRIANI	3	4	3	4	3	3	3	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
88	081215046367	Arifa	4	3	3	4	3	4	4	3	3
89	085265613271	Fitri Inda Novrida	3	3	3	3	3	3	3	3	3
90	081292872438	muhammad kaka rifqi jaya	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	082283712299	Siska ningsih	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	085351456572	DELVI YULIANTI	4	4	4	4	4	4	4	3	4
93	082123455220	Nela Vernands	4	3	4	4	4	4	4	4	4
94	085161202256	Hamid Septian	4	4	4	4	3	3	3	3	4
95	085274155155	Syafrival, S.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	081275323568	REVAN KOVALEVSKY	4	4	4	4	3	4	3	3	4
97	083199414355	Yoval Eka Putra	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	08116920249	Sujaswadi	4	4	4	4	4	3	3	4	4
99	085263668396	Wel delni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	082276689990	Ega juniardi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	089565788899	Azmi nur	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	085263121511	085263121211	4	4	1	4	4	4	4	4	4
103	081224595764	Firdaus Rivai	3	3	3	3	3	3	3	3	4
104	082284458453	ARI WAHYUDI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	082388101600	HANIATI ZAHRA	3	3	4	3	3	3	3	3	3

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
106	083197245863	Yumelis wita	3	2	2	4	4	2	4	4	4
107	085211211080	Faizah Tsurayya	3	2	3	4	3	3	3	3	4
108	082174530969	Wilda Susanti	3	4	3	4	4	4	3	3	3
109	085766382212	Putri vanesya	4	4	4	3	4	4	4	4	4
110	081374312046	Riyanti	4	3	3	4	4	4	3	3	4
111	082181118860	Monalisa syofyan	3	3	3	2	3	3	3	3	3
112	081363883688	Nurmailis	3	3	4	3	3	4	3	3	4
113	082390794509	Haifa akmil	3	3	3	3	3	3	3	3	3
114	081266632218	Warni wati	3	2	4	3	3	3	2	3	4
115	081266729130	Ernita	4	4	4	2	4	4	4	4	4
116	082287231611	Andri dalpira	4	3	3	3	3	3	3	2	4
117	085266869468	Janestio pranata	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118	082381945578	Ns.juniarti.s.kep	3	3	3	3	3	3	3	3	3
119	081267275400	Hesy Yosfita	2	2	2	2	2	3	3	2	3
120	0895619449016	AQILA NASYIFA	4	3	4	4	4	4	4	4	3
121	081261762423	Dila Kumia Putri	4	3	3	3	3	3	3	3	4
122	081374778446	Betri yulis	3	3	3	3	3	3	3	3	3
123	082287687064	DEDI KURNIABPUTRA	3	3	3	2	3	3	3	3	3

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
124	082173585154	Telnia enjulina rahma	4	4	3	3	4	4	4	4	4
125	081364647301	Junidar	4	3	3	4	3	4	3	3	4
126	085262394912	Tria mulyani	4	4	4	3	4	3	3	3	4
127	081280607984	Nofrianti	4	4	3	4	3	4	4	3	4
128	085273208355	faeisal masli	4	3	3	3	3	3	4	3	3
129	082268142694	Afriza Lathifa Sari	3	3	3	3	3	4	3	3	4
Total			438	421	414	439	419	431	427	404	452
NRR			3.4	3.26	3.21	3.4	3.25	3.34	3.31	3.13	3.5
NRR Tertimbang			0.37	0.36	0.35	0.37	0.36	0.37	0.36	0.34	0.39
IKM			3.27								
Konversi IKM			81.75								
Nilai Layanan			B: Baik								

Keterangan :		No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan	U1	Persyaratan	3.4
NRR	Nilai rata-rata	U2	Prosedur	3.26
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Waktu Pelayanan	3.21
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi	U4	Biaya/Tarif	3.4
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0.111 per unsur	U5	Produk Layanan	3.25
IKM UNIT PELAYANAN		U6	Kompetensi pelaksana	3.34
Mutu Pelayanan :		U7	Perilaku pelaksana	3.31
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.13
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	U9	Sarana dan Prasarana	3.5
C (Kurang Baik)	: 65 - 76,60			
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99			

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPD BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NILAI IKM	Nama Layanan
82	Jumlah : 129 Orang
	Jenis Kelamin : L = 53 orang / P = 76 orang
	Pendidikan : SD = 2 orang
	SMP = 4 orang
	SMA = 33 orang
	DIII = 14 orang
	S1 = 59 orang
	S2 = 14 orang
	S3 = 0 orang
	Periode : 01-01-2025 s/d 31-12-2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Dari perhitungan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dari aplikasi SEPAKAT tersebut dapat di buat tabel Tingkat kepuasan Pelayanan Organisasi sebagai berikut :

Tabel 3.3.3. 3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	SB (90)	B (82)	91.11	Sangat Tinggi	
Rata-rata capaian kinerja					91.11		

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat bernilai **91.11% dengan arti Sangat Tinggi.**

d. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Realisasi dari indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3.3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	KINERJA 2024			KINERJA 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	83,31	89,53	107,46	90	82	91,11

Dari tabel yang disajikan dapat dilihat Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2024 pada sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi memiliki target nilai kepuasan sebanyak 83.31 dan realisasi 89,53 kategori "Sangat Baik" dengan capaian kinerja 2024 sebesar 107.46%. Tahun 2025 dengan target nilai 90 dan terealisasi sebanyak 82 dengan kategori "Baik" dengan capain kinerja untuk tahun 2025 adalah 91.11%. Tahun 2025 adalah 91.11% dengan kategori "Sangat Tinggi".

Terjadinya penurunan terhadap realisasi sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi* disebabkan perubahan penggunaan aplikasi penghitungan kualitas pelayanan organisasi. Tahun 2023 dan 2024 Biro Administrasi Pembangunan menggunakan google chrome dalam menyebarkan kuisisioner kepada seluruh responden yang menggunakan aplikasi Simbangda baik kepada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Sedangkan tahun 2025 sesuai dengan arahan Biro Organisasi untuk menghitung nilai kualitas pelayanan organisasi menggunakan aplikasi Sepakat yang dibuat oleh Biro Organisasi.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dokumen Renstra

Biro Administrasi Pembangunan mulai melakukan penilaian terhadap Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran III

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra (%)	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	NA	80	83	83,31	90	NA	88,33	85,93	89,53	82	NA	110,28	103,53	107,46	91,11	8 (75)	109,33	
			Rata-rata Capaian Sasaran III										NA	110,28	103,53	107,46	91,11			
			KRITERIA PENILAIAN										SANGAT TINGGI							

Berdasarkan tabel diatas bahwa Biro Administrasi Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator **Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi** untuk target dari tahun 2022 Sangat Baik, tahun 2023 mengalami penurunan dan 2024 mengalami peningkatan terhadap realisasi. Dimana 2022 target 80 memperoleh realisasi 88,33 kategori Sangat Baik dengan capaian indikator kinerja 110,28 dengan kriteria "Sangat Tinggi". Tahun 2023 dengan target 83 dan terealisasi 85,93 dengan ketegori Baik dan capaian indikator kinerja 103,53. Terjadinya penurunan di tahun 2023 karena terdapatnya refofusing. Untuk tahun 2024 memiliki target 83,31 dengan realisasi 89,53 dengan kategori Sangat Baik dan capaian kinerja indikator sebesar 107,46 dengan ketegori tinggi. Ditahun 2025 memiliki target 90 (Sangat Baik) dengan realisasi 82 (Baik) dengan capaian kinerjanya 91,11 termasuk kategori "Sangat Tinggi". Sedangkan perbandingan dengan dokumen Renstra capaian kinerja indikator mengalami penurunan sebesar 109,33% dengan kategori "Sangat Tinggi".

Terjadinya penurunan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi di tahun 2025 oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebabkan karena perubahan dalam memperoleh data responden. Tahun-tahun sebelumnya Biro Administrasi Pembangunan menggunakan google chrome sedangkan tahun 2025 untuk mendapatkan data responden menggunakan aplikasi SEPAKAT sehingga mengalami penurunan hasil kepuasan pelayanan organisasi diakibatkan karena aplikasi sepakat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan standard pada umumnya pada setiap Perangkat Daerah sehingga tidak ada pertanyaan yang spesifik terhadap pelaksanaan pelayanan yang diberikan Biro Administrasi Pembangunan. Selain itu terdapatnya respondennya yang tidak jelas siapa yang akan mengisi karena identitas responden yang mengisi kuisioner tidak lengkap. Bahkan satu orang bisa lebih satu kali mengisi kuisioner.

f. Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Nilai Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi secara Nasional pada tingkat Kementerian tidak ada yang bisa dijadikan pembanding oleh Biro Administrasi Pembangunan. Dapat dilakukan pembandingan dengan Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dimana yang paling tinggi nilai tingkat kepuasan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Nilai 98 (SB), sementara nilai tingkat kepuasan pelayanan Biro Administrasi Pembangunan dengan nilai 82 sangat jauh berada di bawah DPMPTSP. Sedangkan untuk lingkup Sekretariat Daerah Nilai Biro Administrasi Pembangunan diurutkan terakhir dari 9 Biro seperti tabel di bawah ini :

TABEL REKAPITULASI NILAI SKM PER OPD TAHUN 2025

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SKM
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98
2	Biro Umum	94,75
3	DP3AP2KB	93,75
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	92
6	RSUD Pariaman	92,25
7	Biro Administrasi Pimpinan	90,75
8	Sekretariat DPRD	91
9	Biro Organisasi	90
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,5
11	RSJ Prof. HB Saanin	89,75
12	Balitbang	89,25
13	Bappeda	87,75
14	Dinas Kesehatan	88
15	Disperkimtan	88
16	DSDA dan Bina Konstruksi	87,75
17	Biro Hukum	86,5
18	BPSDM	87
19	Badan Penghubung	87
20	BPKAD	86,75
21	DBMCKTR	86,5
22	UPTD RS Paru Sumbar	86,75
23	Dinas Sosial	86,25
24	Disnakeswan	86,25
25	Diskominfotik	85,5
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	84,75
27	RSUD Mohammad Natsir	84,75
28	Biro Perekonomian	84
29	Badan Kepegawaian Daerah	83,75
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83,75
31	Dinas Pariwisata	84
32	Satpol PP	83,5
33	RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	84
34	Biro Kesejahteraan Rakyat	82,75
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	83
36	Dinas Lingkungan Hidup	82,5
37	Dinas Pangan	83
38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	82,25
39	Biro Administrasi Pembangunan	81,75
40	Inspektorat	82
41	Dinas Pendidikan	82

42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81,5
43	Dinas Perhubungan	82,25
44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	82
45	Dinas Kebudayaan	81,75
46	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	81,5
47	Dinas Pemuda dan Olahraga	82,25
48	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	82
49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,25
50	Dinas Kehutanan	81,25
51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80
52	Badan Pendapatan Daerah	69

g. Perkembangan Indikator Kinerja dari Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja yang akan dilihat Pada Bagian ini yaitu Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan mengukur tingkat kepuasan dari stakeholder yaitu ASN lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membutuhkan pelayanan administrasi pengendalian pembangunan. Untuk tahun 2021 s.d 2024 cara pengukuran indeks ini dengan menyebarkan kuisisioner kepada seluruh ASN melalui google chrome yang disebarakan melalui whatsapp grup Simbangda Berbasis Eviden, Grup Penatausahaan dan Grup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Tahun 2025 pengukuran dilakukan melalui aplikasi Sepakat yang dikelola Biro Organisasi, yang mana hasil indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

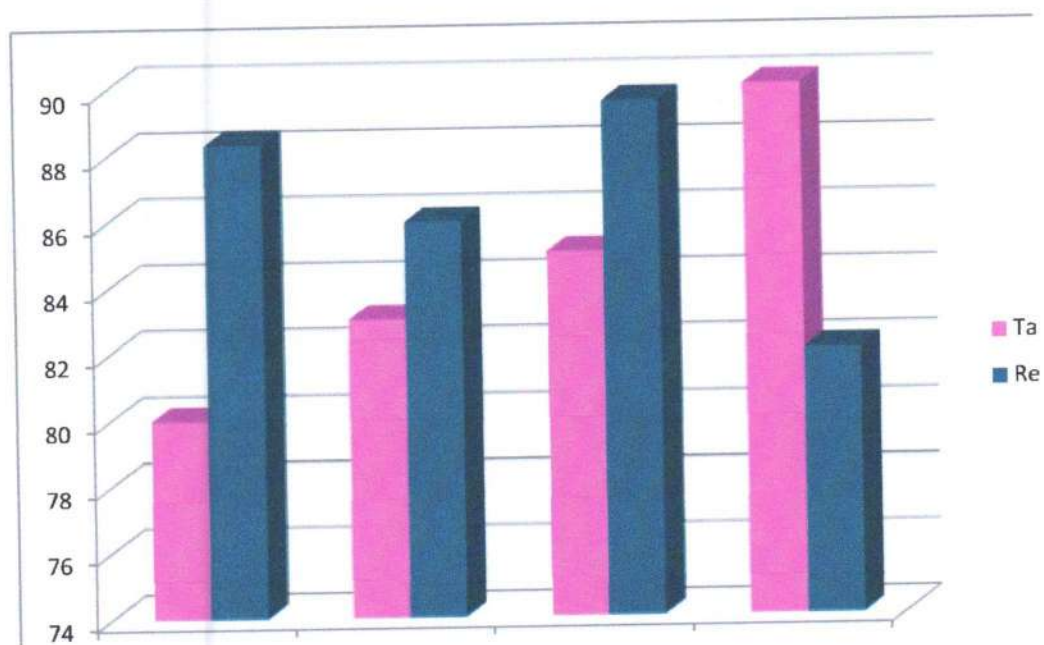
Tabel 3.3.3. 6 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	NA	80	83	83.31	90	NA	88.33	85.93	89.53	82	NA	110.28	103.53	107.46	91.11
			Rata-rata Capaian Sasaran III										NA	110.28	103.53	107.46	91.11
			KRITERIA PENILAIAN										SANGAT Tinggi				

Pada tahun 2021 Biro Administrasi Pembangunan belum mempunyai target karena saat itu belum ada muncul di Renstra Biro. Untuk 2022 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan terhadap target dan untuk realisasi mengalami penurunan. Dimana 2022 target 80 memperoleh realisasi 88.33 kategori Sangat Baik dengan capaian indikator kinerja 110.28% dengan kriteria "Sangat Tinggi". Tahun 2023 dengan target 83 dan terealisasi 85,93 dengan ketegori Baik dan capaian indikator kinerja 103,53% dengan kategori "Sangat Tinggi". Terjadinya penurunan di tahun 2023 karena terdapatnya recofusing anggaran tahun 2023. Untuk tahun 2024 memiliki target 83.31 dengan realisasi 89,53 dengan kategori Sangat Baik dan capaian kinerja indikator sebesar 107.46% dengan ketegori "Sangat Tinggi". Tahun 2025 memiliki target 90 dengan realisasi 82 dengan kategori "Baik" dan capaian kinerja indikator sebesar 91.11% dengan ketegori "Sangat Tinggi"

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III terhadap Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022 s.d 2025 dapat juga dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 4 Sasaran Strategis III Tahun 2022 s.d 2025



Pada grafik diatas dapat diartikan bahwa tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang artinya bahwa pelayanan yang diberikan Biro Administrasi Pembangunan sudah memuaskan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota. Sedangkan tahun 2025 terjadi penurunan dalam memberikan pelayanan kepada responden yang berhubungan dengan Biro Administrasi Pembangunan karena terjadi perubahan dalam cara pengumpulan data responden dari google chrome ke aplikasi Sepakat.

h. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja Yang Telah Dilakukan

Adapun faktor penyebab kegagalan pencapaian ini adalah karena:

1. Biro Administrasi Pembangunan sudah menyiapkan kuisoner dan semua keperluan dalam melakukan tabulasi nilai IKM untuk layanan pengendalian administrasi pembangunan pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat melalui google chrome dan sudah terlaksana, akan tetapi data ini tidak dapat dipergunakan karna di bulan September dari Biro Organisasi mewajibkan seluruh OPD menggunakan Sepakat dalam mengumpulkan data kepuasan pelayanan OPD.
2. Hasil penialain pada aplikasi sepakat terdapat orang menggunakan akun palsu karena tidak bisa dilacak kembali akunnya .
3. Penggunaan aplikasi sepakat yang terburu-buru tanpa ada survei keyakan hasil yang akan diperoleh OPD menyebabkan turunnya nilai penilaian karena pertanyaan yang disampaikan secara global tanpa pertanyaan yang spesifik terhadap pelayanan yang diberikan OPD
4. Perlunya dievaluasi penggunaan aplikasi sepakat yang menyebabkan turunnya nilai Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

i. Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan Yang menunjang Keberhasilan

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tidak memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan khusus untuk mendukung sasaran tersebut sehingga tidak membutuhkan biaya dalam mewujudkan sasaran dan mencapai indikator kinerja.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten Saat ini di Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdapat 2 orang tenaga IT yang mendukung berfungsinya aplikasi Simbangda Base Evidence dalam
2. Sarana dan prasarana yang memadai Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Ketersediaan Anggaran yang Efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2025 ketersediaan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 978.000.617,- dengan realisasi sebesar Rp 958.723.651,- atau sebesar 99,40%. Dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.335.035,- atau sebesar 0,6% dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 91,11%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera yang berasal dari sisa belanja Pengamanan BMD, Pemeliharaan Kendaraan dan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya. Adapun anggaran yang tersedia pada 1 program, 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3.3. 7 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN Rp.	REALISASI ANGGARAN Rp.	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					970,455,617	951,543,651	98.05
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	18,400,000	18,291,665	99.41
			Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	18,400,000	18,291,665	99.41
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	34,320,000	34,320,000	100
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	27 orang	27 orang	34,320,000	34,320,000	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	754,576,861	736,634,930	97.7
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	14,599,005	13,659,244	93.56
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	19,086,500	19,086,500	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	621,355,317	604,353,147	97.26
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	99,536,039	99,536,039	100

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	89,758,756	89,758,756	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	89,758,756	89,758,756	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	73,400,000	72,538,300	96.99
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit	73,400,000	72,538,300	98.83
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	21 unit	7,545,000	7,180,000	95.16

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 223.423.756

CK = Capaian Kinerja (%) = 91.11%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 222.088.721

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.}223.423.756 \times 91,11\%) - \text{Rp.}222.088.721}{\text{Rp.}223.423.756} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{20.356.138.409,16 - 222.088.721}{\text{Rp.}223.423.756} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = 29,27 %

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((Anggaran \times Rata2\ Capaian) - Realisasi\ Anggaran)}{Anggaran} \times 100\%$	$NE = 50\% + (Efisiensi\ Kinerja) \times 50$
Sasaran 3	223.423.756	222.088.721	91,11%	-0,08	29,27%

Dari pagu anggaran untuk Sasaran III sebesar Rp. 223.423.756,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 222.088.721,- dengan realisasi 99,40% dan capaian kinerja mencapai 91,11%. Dalam melaksanakan Sasaran III dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.335.035,- (0.6%). Dapat disimpulkan bahwa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai efisiensi sebesar 29,27% dengan anggaran yang tersedia diperoleh nilai efisiensi kinerja -0.08% yang artinya dengan anggaran Rp. 223.423.756,- Biro Administrasi Pembangunan termasuk dapat menggunakan anggaran dengan efisien.

Efisiensi yang dilakukan dengan melakukan penghematan terhadap pembayaran asuransi kendaraan, pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan komputer/laptop/printer.

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan anggaran murni sebesar Rp. 2.000.000.000,- Pada saat pergeseran dilakukan efisiensi anggaran sebesar 50% sehingga anggaran Biro Administrasi Pembangunan tersisa Rp. 1.080.013.737. Anggaran perubahan tahun 2025 Biro Administrasi pembangunan menjadi Rp. .1.180.013.737,-. Anggaran tersebut diperuntukan untuk 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Sampai konsidi akhir tahun 31 Desember 2025 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah merealisasi anggaran sebesar Rp. 1.105.887.651,- atau sebesar 93.72%. Adapun realisasi anggaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.19

Tabel 3.4. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	BELANJA DAERAH	Rp. 3.184.913.737,-	Rp. 3.105.897.651,-	97,73
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp. 995.493.737,-	Rp. 975.557.651,-	98
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 15.523.200,-	Rp. 15.202.000,-	97,93
1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.283.200,-	Rp. 3.250.000,-	98,99
1.b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12.240.000,-	Rp. 11.952.000,-	97,65
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.969.920,-	Rp. 1.632.000,-	82,85
2.a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 1.969.920,-	Rp. 1.632.000,-	82,85
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 18.400.000,-	Rp. 18.291.665,-	99,41
3.a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 18.400.000,-	Rp. 18.291.665,-	99,41
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 34.320.000,-	Rp. 34.320.000,-	100
4.a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 34.320.000,-	Rp. 34.320.000,-	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 754.576.861,-	Rp. 736.634.930,-	97,62
5.a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 14.599.005,-	Rp. 13.659.244,-	93,56
5.b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 19.086.500,-	Rp. 19.086.500,-	100
5.c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 621.355.317,-	Rp. 604.353.147,-	97,26
5.d	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 99.536.039,-	Rp. 99.536.039,-	100
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 89.758.756,-	Rp. 89.758.756,-	100
6.a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 89.758.756,-	Rp. 89.758.756,-	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 80.945.000,-	Rp. 79.718.300,-	98,48
8.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 73.400.000,-	Rp. 72.538.300,-	98,83
8.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 7.545.000,-	Rp. 7.180.000,-	95,16
II	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp. 184.520.000,-	Rp. 130.330.000,-	70,63
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 104.770.000,-	Rp. 77.521.000,-	73,99
1.a	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 16.800.000,-	Rp. 8.496.000,-	50,57
2.b	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 39.000.000,-	Rp. 35.195.000,-	90,24
3.c	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 48.970.000,-	Rp. 33.830.000,-	69,08
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 79.750.000,-	Rp. 52.809.000,-	66,22
2.a	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 40.850.000,-	Rp. 24.895.000,-	60,94
2.b	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 25.200.000,-	Rp. 24.029.000,-	95,35
2.c	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 13.700.000,-	Rp. 3.885.000,-	28,36

Realisasi anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja. Sebagai salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara terperinci pagu alokasi anggaran setiap program dan ketercapaian penyerapan pada masing-masing program dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.4. 2 Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja tahun 2025			Program	Anggaran Tahun 2025		
			Targe t	Real isasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kot a yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan	97%	98.73	101.78	Kebijakan Administrasi Pembangunan	184,520,000	130,330,000	70.63
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72)	BB (73.76)	102.44	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	995,493,737	975,557,651	98
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	SB (90)	B (82)	91.11				
Capaian Kinerja					98.44	Capaian Anggaran	1,180,013,737	1,105,887,651	93.72

Berdasarkan tabel 3.4.2 diatas diketahui bahwa

1. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian 3

sasaran kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 1.180.013.737

CK = Capaian Kinerja (%) = 98.44%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 1.105.887.651

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.1.180.013.737\%} \times 98,44\%) - \text{Rp. 1.105.887.651}}{\text{Rp. 1.180.013.737}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{11800013775 - 1.105.887.651}{\text{Rp. 1.180.013758}} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = 61.80 %

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%) NE= 50% + (Efisiensi Kinerja) x 50
				(Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran : Anggaran x100%	
Sasaran 4	1.180.013.737	1.105.887.651	98.44%	0.05	61.80%

- Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi dengan nilai efisiensi sebesar 61.80% dan efisiensi kinerja sebesar 0.05 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 98.44%. Efisiensi terutama dilakukan dalam belanja pengadaan laptop, pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan bangunan kantor. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi
- Pada tahun 2025 serapan anggaran terbesar ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan sebesar 98%, berikutnya Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan serapan anggaran sebesar 70.63%.

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2025

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	97 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	SB (90)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.687.957.000,-	APBD
3.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	312.043.000,-	APBD

Padang, 20 Januari 2025

Pj. Sekretaris Daerah
PIHAK KEDUA,



YOZARWARDI USAMA PUTRA, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Kepala Biro Administrasi Pembangunan
PIHAK PERTAMA,



RIA WIJAYANTY, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770413 200003 2 002